



SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN DI DAERAH SUMATRA UTARA



. 72
GJ
NS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan.

SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN DI DAERAH SUMATRA UTARA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1983.

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah Sejarah Tentang Pengaruh Pelita Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Utara 1981/1982.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari DR. P. Payung Bangun MA, Drs. Sanusi, Drs. H. Siahaan, Drs. Sudarman Gurning, Drs. S. Rumahorbo dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Drs. Mardanas Safwan, Sutrisno Kutoyo.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, September 1983.

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1981/1982 telah berhasil menyusun naskah Sejarah Tentang Pengaruh Pelita di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatra Utara.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapakan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, September 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Rumusan Permasalahan	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Pertanggungjawaban Penulisan	8
BAB II. KEADAAN DESA SEBELUM PELITA DI SUMATERA UTARA	11
A. Lingkungan Alam dan Penduduk	11
1. Keadaan Alam	11
2. Penduduk	12
B. Pemerintahan	15
1. Kabupaten Tapanuli utara	20
2. Kabupaten Simalungun	26
3. Kabupaten Deli Serdang	36
BAB III. PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	47
A. Landasan Pelaksanaan	47
B. Pelaksanaannya	51
C. Hasil yang diperoleh	56
D. Keadaan perekonomian di Desa	65
BAB IV. PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	67
A. Struktur Pemerintahan	67
B. Cara Pemilihan Aparat Pemerintahan Desa	68
C. Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non Pemerintah	69
D. Organisasi Politik dan non Politik	72

BAB V. PENUTUP	76
A. Rangkuman Isi	76
B. Kesimpulan	78
C. Harapan	81
DAFTAR SUMBER	82
DAFTAR INFORMAN	84

BAB I PENDAHULUAN

A. RUMUSAN PERMASALAHAN

Setelah terbentuknya pemerintahan Orde Baru, timbullah keinginan untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, sesuai dengan kehendak rakyat yang tersimpul dalam Ampera. Untuk melaksanakan tuntutan dan kehendak rakyat itu masih diperlukan, waktu karena dalam masyarakat masih kelihatan pengaruh dari Orde Lama beberapa faktor yang merupakan penghambat bagi tujuan tersebut antara lain ialah:

1. Pada masa itu masih dijumpai sisa G-30-S/PKI walaupun secara fisik telah dibubarkan tetapi mental ideologinya masih ada.
2. Di dalam aparat pemerintahan masih terjadi pengkotakan yang disebabkan pengaruh ideologi. Kewibawaan pemerintah dengan demikian menjadi hilang karena setiap petugas lebih setia kepada partainya dari para pemerintah sebagai atasannya.
3. Di dalam kehidupan masyarakat keadaan tersebut juga demikian, setiap kelompok dalam masyarakat terpecah akibat orientasi mereka yang berbeda.
4. Keadaan perekonomian tidak menggembirakan, keadaan keuangan negara dan balans perdagangan menunjukkan neraca yang tidak menguntungkan.
5. Pendapatan per kapita penduduk sangat rendah sehingga penduduk Indonesia pada waktu itu tergolong pada kelompok negara miskin di dunia.
6. Kehidupan sosial belum mantap, pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 belum berjalan menurut semestinya.

Pemerintah Orde Baru berhasil melakukan stabilisasi dalam bidang politik, keamanan, sosial budaya serta melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang diadakan di Jakarta pada tahun 1968 lahirlah suatu keputusan MPRS yang terkenal dengan TAP MPRS No. XVI/MPRS/1968

dan dalam ketentuan itu tercantum:

1. Dalam rangka melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan perencanaan Pembangunan Lima Tahun perlu dibentuk kabinet pembangunan.
2. Politik Kabinet Pembangunan ini sesuai dengan kehendak rakyat menuju ke arah stabilisasi dan pembangunan Nasional.

Dalam ketetapan MPRS tugas kabinet pembangunan adalah:

1. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan pembangunan Lima Tahun dan pemilihan umum.
2. Menyusun dan melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Pertama.

Sebagai realisasi dari Rencana tersebut telah disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun melalui BAPPENAS yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor: 319 tahun 1968. Isi pokok dari Keputusan Presiden itu adalah:

- Pasal 1. Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969 – 1973 sebagaimana termuat dalam buku I, II dan III Lampiran Keputusan Presiden merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun.
- Pasal 2. Kebijakan pelaksanaan Repelita akan dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan lainnya.
- Pasal 3. Penuangan dalam rencana Tahunan sebagaimana terdapat dalam Keputusan Presiden ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan memerlukan penyesuaian terhadap Repelita.

Dengan adanya Pelita maka pembangunan dilaksanakan secara tahap demi tahap. Sejak kemerdekaan diproklamasikan kegiatan lebih dititik-beratkan pada bidang politik, seluruh kegiatan tertumpu kepada kota. Kota merupakan pusat kehidupan para intelektual

dan cerdik cendekiawan, di sanalah terdapat lembaga politik seperti partai-partai.

Penduduk desa kurang mendapat perhatian, desa dianggap sebagai penghasil bahan makanan dan tidak menentukan dalam kehidupan masyarakat. Penghidupan masyarakat desa kurang berkembang dari tahun ke tahun. Lebih banyak peranan desa dilakukan oleh tokoh adat atau agama daripada petugas desa yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur desa. Walaupun ada kekuasaan diberikan pemerintah kepada kepala desa atau yang di Sumatera Utara disebut *Penghulu*, tetapi untuk menegakkan kewibawaannya ia tidak mempunyai alat, kantornya tidak ada, pegawainya dan lain-lain tidak lengkap.

Pada umumnya di daerah pedesaan Sumatera Utara sebelum adanya Pelita kehidupan masyarakat belum banyak mengalami perubahan. Dalam pada itu pengaruh Pelita juga mulai masuk ke desa, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. Keadaan kehidupan di desa makin sulit, hubungan jalan antara desa dengan kota tidak lancar.
pat dalam

Penduduk desa mulai tertarik ke kota. Mereka melihat kota sebagai suatu tempat yang dapat memberi kesenangan hidup. Orientasi penduduk desa umumnya tertuju ke kota, mereka mengharapkan kotalah yang dapat mengubah nasib mereka. Setiap anak yang telah meningkat dewasa segera meninggalkan desa pindah ke kota untuk melanjutkan pelajaran dan mencari nafkah. Kota pada masa itu menjadi tumpuan pendatang dari desa yang menyebabkan urbanisasi.

Di Sumatera Timur terutama pada kota-kota besar dalam tempo singkat penduduknya bertambah cukup banyak. Sumatera Timur yang penuh dengan daerah perkebunan yang tidak dapat meluaskan areal pertanian karena penduduk desa mengerjakan tanahnya terus-menerus secara tradisional.

Di daerah pantai terdapat pula desa pantai yang juga tidak mengalami kemajuan seperti desa pertanian. Hubungan seperti jalan raya tidak lancar dan kurang, alat komunikasi seperti radio juga kurang.

Hasil pertanian ditampung oleh para tengkulak yang menampung hasil penangkapan ikan dan lain-lain. Keadaan terisolasi seperti itu menyebabkan desa tetap statis, masyarakat tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Dengan adanya Pelita maka pemerintah Sumatera Utara segera menggerakkan pembangunan di daerahnya untuk mengejar ketinggalan. Untuk melaksanakan pembangunan pada setiap Pelita diberikan prioritas pada suatu yang penting dan perlu mendapat perhatian. Repelita I meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian, daerah pedesaan mulai mendapat perhatian pemerintah. Dengan Pelita pertama pemerintah Sumatera Utara melakukan pembangunan daerah pedesaan sesuai dengan program yang bersifat nasional.

Pelaksanaan Repelita pertama di Sumatera Utara dapat dilakukan tepat waktunya karena Pemerintahan Daerah sebelumnya telah melaksanakan Tri Program Pokok Pemerintahan Daerah, yaitu rehabilitasi, konsolidasi dan stabilisasi. Program ini sesuai dengan program pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Dalam pembangunan daerah pertanian atau desa pelaksanaan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa.

Dengan adanya Repelita I mulai diadakan perubahan di desa-desa daerah pertanian yang belum diolah sekarang mulai dimanfaatkan. Kantor Agraria melakukan pencatatan kembali tanah adat, hak milik dan sebagainya agar tanah itu mulai diolah. Petugas agraria melakukan penyuluhan mengenai hukum agraria sampai ke kecamatan.

Dengan adanya penyuluhan maka pemanfaatan tanah dapatlah dilakukan sebaik mungkin. Kegiatan pertanian di pedesaan semakin pula, karena tanah telah mulai dikerjakan dengan baik. Untuk meningkatkan hasil pertanian Dinas Pertanian mulai melakukan intensifikasi pertanian dengan membantu para petani dengan memberikan obat pembasmi hama tanaman dan pemberian bibit unggul.

Dinas Kehewan dan Perikanan juga melakukan kegiatan serupa. Dengan keadaan ini maka kegiatan di daerah pedesaan setelah Pelita pertama mulai kelihatan meningkat.

Jalan raya juga mulai dikerjakan dan diperbaiki, ada yang hanya dibatui dengan program pengerasan jalan ada juga yang di-

aspal. Di desa yang telah meningkat penghasilannya atas kesadaran penduduk sendiri jalan diperbaiki, ada pula atas biaya pemerintah daerah.

Pendidikan juga mendapat perhatian pemerintah, beberapa bangunan yang telah mengalami kerusakan seperti sekolah dasar mulai diperbaiki. Peningkatan kesejahteraan desa, meningkatkan pula jumlah murid yang bersekolah. Perbaikan desa mulai sejak Repelita I dilanjutkan pada Repelita II dan ke III.

Walaupun selama Repelita ada peningkatan kesejahteraan desa tetapi ada pula beberapa desa yang tidak begitu kelihatan kemajuannya, karena adanya hambatan dari desa itu. Hambatan itu terjadi karena sikap rakyat desa yang belum dapat menerima perubahan karena tradisi yang mengikatnya, kurangnya komunikasi, terisolasi dan sebagainya. Kemajuan yang dicapai desa perlu diketahui dan ada pula yang masih belum mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini perlu diketahui untuk melakukan tindakan dalam melanjutkan Pembangunan.

Pengaruh yang dicapai dalam Repelita I dan II terjadi dalam berbagai bidang dan pengaruhnya itu tentu tidak dapat dijelaskan secara menyeluruh dan sekecil-kecilnya yang akan diuraikan, yaitu "Pengaruh Pelita dalam Pemerintahan Desa" Dengan adanya pembatasan maka penulisan akan dapat mencapai sasaran. Pengaruh yang dibicarakan adalah bentuk pemerintahan desa, cara pemilihan pimpinan, peranan pemimpin formal dan non formal, kegiatan organisasi desa dalam kehidupan di desa.

Pengaruh ini penting dibahas karena dalam kegiatan desa sebelum Pelita belum banyak, tetapi setelah Pelita kegiatannya meningkat. Perubahan mengakibatkan susunan pemerintahan desa mengalami perubahan pula. Fungsi kepala desa tidak lagi seperti dahulu, demikian pula administrasi desa tidak dapat dikelola sebagai sedia kala.

Kepala Desa dahulu hanya sebagai pengutip pajak dan pemimpin formal di desa, sekarang kedudukan dan pekerjaannya lebih luas karena kegiatan lebih banyak. Kepala Desa sekarang tidak saja sebagai pengetua desa tetapi diminta pemikirannya untuk membawa desa kepada kemajuan. Untuk ini diperlukan seorang yang mempunyai pengetahuan luas dan dapat bekerja

sama dengan segala lapisan penduduk yang tinggal di desa itu.

Desa bukan lagi suatu bentuk persekutuan kelompok suku atau marga tetapi telah merupakan organisasi masyarakat yang modern di mana lembaga yang terdapat dalam masyarakat maju didapati pula di sana. Desa dewasa ini perlu mendapat pengamatan karena telah mengalami suatu perkembangan dan kemajuan.

B. TUJUAN PENULISAN

Sejak terbentuknya pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pembangunan Nasional secara menyeluruh melalui tahapan yang disebut Pelita. Pembangunan yang dijalankan itu disesuaikan dengan tuntutan rakyat yang terkenal dengan nama Tritura.

Untuk melaksanakan Pembangunan maka disusun suatu rencana pembangunan yang dinamai Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yang dimulai sejak tahun 1969, sampai sekarang telah memasuki Pelita ketiga. Dengan adanya pembangunan, maka kehidupan masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan.

Perubahan telah terjadi di desa, kota, daerah pertanian, daerah nelayan maupun di daerah perkebunan. Tetapi sejauh mana perubahan itu belum diketahui dengan pasti, dan untuk itu diperlukan suatu penelitian ataupun penulisan mengenai hal tersebut. Data mengenai pengaruh Pelita penting sekali dikumpulkan karena dengan adanya data tersebut dapatlah dilakukan:

1. Penilaian mengenai hasil kerja yang telah dicapai selama ini. Dengan adanya penilaian dapat pula diketahui kekurangan yang telah terdapat dalam pelaksanaan Pelita, serta hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan.
2. Data mengenai pengaruh Pelita itu dapat pula menjadi suatu informasi bagi penelitian kemudian yang akan melakukan suatu penyelidikan di daerah pedesaan sehingga data itu dapat dijadikan pedoman.
3. Selanjutnya penulisan yang dilakukan mengenai masyarakat pedesaan itu dapat pula dijadikan suatu sumber sejarah kemudian hari dalam menyelidiki perkembangan Pelita di daerah pedesaan.

Penulisan Sejarah | Pengaruh Pelita di Daerah merupakan suatu sumber yang penting bagi generasi yang akan datang untuk menyusun suatu sejarah Indonesia yang lebih baik. Pada masa lalu kalau ingin menyusun sejarah Indonesia sering memakai sumber yang berasal dari pandangan dan gambaran penulis asing. Sumber yang demikian itu banyak kelemahannya. Kelemahan yang terdapat pada penulisan yang dilakukan orang asing itu tentunya akan mewarnai sejarah Indonesia pula, karena mereka menguraikan keadaan dan kenyataan yang dilihatnya sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidupnya. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat dan budaya bangsa Indonesia.

Dengan penulisan di atas maka dapat pula diketahui suatu gambaran perkembangan masyarakat pedesaan di Indonesia, dengan pengertian setiap daerah mempunyai bentuk tersendiri. Bentuk yang berbeda itu merupakan suatu keanekaragaman dalam kehidupan pedesaan di Indonesia yang berlandas kepada adat-istiadat dan budaya yang berbeda pula. Penulisan ini dapat pula menjadi suatu gambaran tentang penerimaan desa itu terhadap pembaharuan yang diadakan sebab tidak semua desa dapat dengan mudah menerima pembaharuan yang dilaksanakan.

Ada kalanya suatu desa dengan hati-hati menerima pembaharuan itu sebaliknya ada yang dengan mudah menerimanya. Dari penulisan ini dapat dilihat sikap dari berbagai desa. Sikap ini penting bagi kelanjutan pembangunan desa karena hasil penulisan ini merupakan masukan bagi kelanjutan pembangunan seterusnya.

Penulisan ini akan merupakan suatu sumber yang penting untuk penulisan sejarah bagi masa datang dan juga merupakan suatu permulaan bagi penulisan sejarah yang bersifat nasional, bagi masa mendatang. Dengan data dari desa dapat diketahui perkembangan suatu desa seperti keadaan pertanian, industri, kerajinan yang dilakukan penduduk, perkembangan peternakan dan kehidupan nelayan di daerah desa pantai.

Data itu data pula menjadi sumber dalam penyusunan sejarah desa seperti sejarah pertanian, nelayan, kebudayaan perekonomian di desa. Dengan bertitiktolak dari desa merupakan dasar bagi pertumbuhan sejarah bangsa karena desa merupakan titik tolak dari pertumbuhan sejarah. Selama ini dalam menyusun sejarah sering melupakan kenyataan itu, memulai sejarah dari keraton, kota ataupun tokoh yang melahirkan ide atau cita-cita. Keadaam

itu sering menggambarkan hasil penulisan menjadi berat sebelah, malahan akan melahirkan suatu pertentangan karena tidak mencapai objektifitas.

Desa suatu masyarakat kecil yang kemudian meluas menjadi suatu masyarakat yang lebih besar atau kota dan kemudian negara. Dengan mengetahui seluk-beluk desa maka dapat pula mengetahui sejarah dari bangsa itu, bagaimana sikap hidupnya, dan cara berfikirnya. Setiap bangsa tidak sama dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya sehingga hasil sejarah yang lahir juga berbeda.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN

1. Tahap Persiapan

Penulisan naskah dilaksanakan oleh petugas yang merupakan suatu tim yang anggotanya berasal dari kalangan Perguruan Tinggi dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara, yaitu Bidang Perumusan, Sejarah dan Kepurbakalaan. Tugas tersebut dipercayakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tujuan Penulisan sebagai pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan Daerah sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Tujuan adalah pengaruh Pelita terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di daerah Sumatera Utara dan pengaruh ini dititik-beratkan pada bidang pemerintahan desa.

Untuk mencapai sasaran maka dalam pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa fase atau tahapan. Pembahagian tersebut bertujuan untuk dapat melaksanakan penulisan tersebut dengan teratur dan terarah.

2. Pelaksanaan Pekerjaan

a. Setelah anggota Tim mendapat pengarahan untuk penulisan pada pertengahan bulan Oktober 1981, maka pada akhir Oktober 1981 anggota tim melakukan rapat pendahuluan untuk merencanakan pekerjaan tersebut.

b. Pada bulan Nopember 1981 mulailah anggota tim melakukan survai ke daerah pedesaan yang dijadikan sampel bagi penulisan. Daerah yang disurvei itu sengaja diambil dari desa yang mewakili beberapa daerah yang mempunyai persamaan baik ditinjau dari segi sosial, budaya dan bentuk perekonomian

an, sehingga dapat dianggap mencakup seluruh daerah.

Kabupaten yang diteliti adalah Tapanuli Utara, Simalungun dan Deli Serdang. Tapanuli Utara dianggap mewakili daerah Tanah Batak, Simalungun mewakili daerah yang berdekatan dengan perkebunan dan Deli Serdang mewakili daerah pesisir pantai. Dengan menggunakan ketiga kabupaten ini, maka dapat diharapkan seluruh daerah Sumatera Utara telah terjangkau dalam penulisan ini.

- c. Setelah survai lapangan dapat diselenggarakan maka pada bulan Desember 1981 mulai dilakukan penelitian buku yang mempunyai hubungan dengan penulisan. Penelitian buku-buku itu selesai pada akhir bulan Desember 1981.
- d. Pada bulan Januari 1982 mulailah penulisan dilakukan. Setiap anggota tim memeberikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan ke daerah-daerah. Laporan berupa hasil wawancara maupun naskah yang diperoleh selama penelitian. Laporan itu kemudian dipelajari oleh semua anggota tim, dan kemudian tim merumuskan bahan penulisan.

3. Tahap Pengolahan Data

Bulan Januari 1982 mulai diperoleh laporan dari anggota tim hasil penelitian lapangan masing-masing. Hasil laporan itu merupakan data mentah untuk dibahas dan diadakan beberapa kali sidang yang dipimpin oleh Ketua Tim. Data itu dianalisa, dan dibandingkan data kepustakaan.

Kalau data itu belum mendapat gambaran yang jelas maka oleh pimpinan tim diadakan pengecekan kembali ke lapangan sehingga menjadi jelas.

4. Metode yang Dipergunakan dan Penyusunan Laporan

Dalam melaksanakan penelitian umumnya tim menggunakan metode historis walaupun demikian metode lain juga dipergunakan kalau sekiranya diperlukan.

Untuk data yang diperlukan sebagian besar anggota tim melakukan wawancara karena bahan tertulis banyak yang tidak ditemukan lagi, disebabkan arsip desa yang tidak ada dan banyak pula disebabkan oleh perpindahan kantor sehingga hilang berkasnya.

Hasil wawancara kemudian dianalisa dan dihubungkan dengan bahan tertulis. Dengan data yang telah diolah disusunlah laporan tertulis. Penyusunan laporan diusahakan secara kronologis dan terarah. Untuk memudahkan penulisan maupun laporan itu maka Tim melakukan pelaporan tiap kabupaten dan setiap kabupaten terdiri dari tiga des, sampel. Sengaja disusun demikian karena pada tiap kabupaten dengan kabupaten yang lainnya tidak terdapat persamaan baik bentuk maupun permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian gambaran menyeluruh dapat diharapkan.

BAB II

KEADAAN DESA SEBELUM PELITA DI SUMATERA UTARA

A. LINGKUNGAN ALAM DAN PENDUDUK

1. Keadaan Alam

Sumatera Utara berbatasan dengan propinsi Aceh sebelah utara dan propinsi Sumatera Barat dan Riau di sebelah Selatan, terletak di antara lintang 1° sampai dengan 4° Lintang Utara 98° sampai 100° Bujur Timur. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan disebelah barat dengan Samudera Indonesia. Menurut keadaan alamnya Sumatera Utara terdiri dari daerah dataran rendah yang diselang-seling oleh pantai yang berawa-rawa, dataran tinggi Tapanuli Utara, Karo dan Simalungun.

Daerah dataran tinggi berakhir dengan munculnya Bukit Barisan yang membujur dari utara ke selatan membelah daerah pantai timur dengan pantai barat. Bukit Barisan terdapat beberapa gunung seperti Gunung Sibayak, Sinabung di daerah kabupaten Karo, Gunung Simbolon di daerah Simalungun, Gunung Martimbang di Tapanuli Utara dan Gunung Merapi, Sibual-buali di Tapanuli Selatan. Di antara gunung itu masih banyak yang berapi, sehingga keadaan tanah sekitarnya menjadi subur.

Daerah dataran tinggi dipisah oleh sungai yang mengalir ke Samudera Hindia maupun ke Selatan Malaka, seperti sungai Asahan, sungai Berumun, sungai Deli, sungai Ular, sungai Wampu yang mengalir ke Selat Malaka. Sungai yang mengalir di pantai barat umumnya tidak lebar seperti di pantai timur tetapi agak kecil dan aliran sungainya deras seperti Batang Toru dan Batang Gadis. Sebelum adanya hubungan lalulintas seperti sekarang sungai itu merupakan alat hubungan yang penting antara daerah pantai dengan daerah pedalaman.

Hasil daerah pedalaman dibawa melalui jalur sungai tersebut. Sekarang masih ada juga daerah yang menggunakan aliran sungai itu untuk kepentingan pelayaran dan lintas dagang seperti di daerah Asahan dan Labuhan Batu. Sungai tersebut sering membawa lumpur ke muara sehingga tanah di dataran rendah memperoleh humus tanah yang subur, terutama di pantai Sumatera

Timur. Karena kesuburan tanahnya maka banyak perkebunan diusahakan di daerah itu.

Daerah pantai mempunyai potensi yang sangat baik karena memiliki kekayaan ikan yang banyak di sekitar Selat Malaka maupun disekitar pantai Sibolga, Barus dan Natal. Karena itu sering nelayan asing melakukan pencurian ikan dari daerah Sumatera Utara. Di samping itu daerah pantai yang ditumbuhi tanaman bakau juga dapat dipakai untuk bahan bangunan dan arang. Sebahagian besar arang yang dihasilkan banyak yang diekspor Ke Malaysia dan Singapura.

2. Penduduk

Penduduk Sumatera Utara terdiri dari berbagai-bagai suku yang berasal dari daerah Sumatera Utara dan juga terdapat orang asing. Penduduk asli dari daerah ini ialah suku Batak Toba, Mandailing, Karo, Simlungun, Nias, Dairi dan di pesisir pantai adalah suku Melayu. Suku dari daerah lain ialah Jawa, Minangkabau, Aceh dan suku lainnya yang jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan suku yang tersebut di atas.

Suku Jawa datang ke daerah ini pada umumnya setelah di Sumatera Timur dibuka perkebunan. Mereka didatangkan pemerintah Hindia, Belanda sebagai buruh perkebunan dan ada juga yang ditransmigrasikan. Suku Minangkabau datang ke Sumatera Utara kemudian sejak kegiatan perdagangan mulai berkembang di daerah ini dan mereka kebanyakan hidup sebagai pedagang kecil demikian pula suku Aceh. Bangsa asing masuk ke Sumatera Utara ini juga mula-mula sebagai buruh perkebunan seperti orang Cina dan India. Tetapi karena mereka dapat memanfaatkan keadaan maka kemudian mereka menjadi pedagang yang penting di daerah ini.

Penduduk asli yang mendiami daerah ini sebahagian besar hidup di daerah pertanian, mata pencahariannya pertanian dan menangkap ikan di sepanjang pantai. Tanah pertanian umumnya merupakan milik adat atau milik marga. Setelah beberapa daerah perkebunan dibuka, banyak pula suku Jawa yang mengutusai daerah pertanian, apalagi setelah dibukanya hutan sebagai daerah pertanian. Pada umumnya pertanian yang dijalankan di daerah pedesaan itu sebahagian besar masih bersifat tradisional. Demikian pula di daerah pantai para nelayan menggunakan alat-alat yang

tradisional pula. Karena itu pendapatan penduduk di daerah pedesaan sangat rendah.

Penyebaran penduduk di Sumatera Utra juga tidak merata, di daerah pedesaan yang penduduknya sedang di kota jarang. Keadaan dan kenyataan ini dapat dilihat dari data yang tercantum di bawah ini :

**DATA PENDUDUK DI SUMATERA UTARA
PADA TAHUN 1961 1)**

No.	Nama Kotamadya	Jumlah penduduk pada tahun 1961
1.	Medan	479.098
2.	Binjai	45.235
3.	Tebing Tinggi	26.220
4.	Tanjung Balai	29.152
5.	Pematang Siantar	114.870
6.	Sibolga	38.655

No.	Nama Kabupaten	Jumlah penduduk pada tahun 1961
7.	Deli Serdang	911.621
8.	Langkat	311.615
9.	Karo	147.673
10.	Dairi	138.278
11.	Asahan Batu	409.238
12.	Labuhan Batu	255.997
13.	Simalungun	496.238
14.	Tapanuli Utara	560.354
15.	Tapanuli Tengah	100.796
16.	Tapanuli Selatan	496.060
17.	Nias	314.819

1) *Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Sumatera Utara Membangun, Medan, 1976, hal. 74.*

Penyebaran penduduk di Sumatera Utara pada tahun 1961 lebih banyak di daerah pedesaan daripada daerah di kota-kota. 85% penduduk mendiami daerah pertanian sedang selebihnya di kota, sebagian besar hidupnya dari pertanian dan nelayan. Keadaan ini tidak menguntungkan karena daerah pertanian yang dapat digarap sangat sedikit, karena tanah yang subur telah diusahakan untuk perkebunan sedang yang ada tidak begitu baik. Wilayah pertanian tidak dapat memberikan kehidupan bagi mayoritas penduduk.

Pendapatan penduduk di pedesaan rendah sekali sehingga mereka berusaha untuk meninggalkan desanya. Di desa kehidupan penduduk berlangsung secara tradisional, mereka melakukan pengolahan tanah menurut kebiasaan nenek moyang mereka. Pada zaman kemerdekaan kehidupan penduduk Sumatera Utara tidak banyak berubah, terutama masyarakat desa. Mereka juga terbawa arus pertentangan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Penduduk desa kurang mendapat perhatian pemerintah waktu itu karena pengaruh situasi politik. Desa kurang diperhatikan dan perekonomian desa menjadi lemah.

Banyak penduduk desa yang mengalihkan perhatiannya ke daerah perkebunan yang tanahnya subur. Sering terjadi tanah perkebunan digarap oleh penduduk dengan dukungan ormas atau partai yang berpengaruh pada waktu itu. Keadaan ini sering membuat kewibawaan pemerintah daerah menjadi berkurang.

Penduduk desa yang mendiami daerah yang tidak berdekatan dengan perkebunan tidak memperoleh kehidupan yang baik karena desa mereka telah padat sedang tanah yang mereka garap juga kesuburannya telah berkurang. Kegiatan pertanian kurang dilakukan karena pengetahuan yang kurang dan tidak adanya bimbingan, dan pupuk yang diperlukan juga tidak ada.

Keadaan di desa nelayan juga sama dengan di daerah pertanian. Nelayan menggunakan sampan kecil untuk melakukan penangkapan ikan di sepanjang pantai dengan peralatan seperti jala, pukat dan pancing dan alat ini tidak dapat diharapkan mendapat hasil yang mencukupi. Penangkapan ikan ke tengah laut tidak mungkin karena tidak ada perahu motor. Bila cuaca tidak mengizinkan mereka hanya diam di rumah mereka. Di dalam keadaan ini mereka terpaksa berhutang kepada tengkulak yang umumnya terdiri dari orang Cina yang mempunyai usaha pengasinan ikan. Mereka

terikat kepada pengijon sehingga harga hasil penangkapan ikan tidak lagi mereka dapat menentukan.

Di daerah perkotaan kehidupan penduduk ada yang sebagai karyawan dan pedagang. Penduduk pribumi hidup sebagai pedagang kecil dan pegawai yang kehidupannya hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kalaupun ada yang mempunyai perusahaan tetapi jumlahnya sedikit. Tahun lima puluhan pernah pemerintah memberikan kesempatan bagi penduduk pribumi mengusahakan kegiatan dalam bidang perdagangan tetapi kesempatan itu tidak memperoleh hasil. Ketiadaan modal menyebabkan usaha itu mengalami kegagalan sebaliknya yang berhasil memiliki keuntungan adalah penduduk non pribumi atau Cina. Dengan memeralat pengusaha pribumi sebagai pimpinan kegiatan perdagangan itu sebenarnya dilakukan olah orang non pribumi. Baik di bidang import maupun ekspor peranan itu dilakukan oleh orang Cina, lebih-lebih setelah terjadinya nasionalisme perusahaan Eropa terutama Belanda, kegiatan perdagangan dikuasai oleh orang Cina, sampai saat ini.

Cina dapat mempergunakan kesempatan karena mereka dapat mengumpulkan modal, melalui organisasi mereka yang bersifat kesukuan dan daerah dari mana mereka berasal seperti suku *Kong Hu*, *Hokkian*, *Tio Chu* dan sebagainya. Mereka dengan mudah dapat membangun suatu usaha terutama dalam perdagangan. Sifat tekun dan rajin yang mereka miliki menjadikan mereka suatu kelompok wiraswasta. Kalau mereka tinggal di kota kecil mereka adalah pengumpul hasil bumi yang kemudian ditampung oleh pedagang kota. Dengan cara organisasi yang teratur seluruh kegiatan perdagangan dari kota kecil sampai ke kota besar seperti Medan, Pematangsiantar dan lain-lainnya berada di bawah pengaruh mereka, seakan-akan memonopoli perdagangan.

B. PEMERITAHAN

Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat maka di Sumatera Utara masih terdapat Negara Sumatera Timur sebagai hasil bentukan pemerintahan Belanda. Sejak awal tahun 1950 lahirlah tuntutan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia untuk menuntut pembubaran negara boneka ciptaan Belanda dan segera membentuk suatu negara kesatuan sebagai pengganti negara serikat. Dengan timbul-

nya tuntutan rakyat itu maka negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur segera dibubarkan.

Dalam proses pembubaran itu terjadilah perundingan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah Republik Indonesia untuk menciptakan suatu negara kesatuan. Di antara kedua pemerintah itu tercapailah suatu kata sepakat pada tanggal 19 Mei 1950 untuk membentuk negara kesatuan dengan mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Akhirnya perubahan Undang-Undang Dasar itu terjadi. Pada tanggal 15 Agustus 1950 keluarlah Undang-Undang RIS No. 7 yang isinya mengenai perubahan konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang terkenal dengan istilah Lembaran Negara 1950. Dengan adanya Undang-Undang Dasar Sementara itu maka pembentukan Negara Kesatuan sebagai pengganti Republik Indonesia Serikat menjadi kenyataan, dan Undang-Undang itu berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Tepat pada hari Ulang tahun Republik Indonesia ke-V maka leburlah RIS dan berdirilah Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan.

Untuk melaksanakan administrasi pemerintahan yang teratur maka pemerintahan RIS melahirkan Undang-Undang No. 21 tahun 1950. Isi Undang-Undang itu mengenai pembentukan daerah otonom. Dengan Undang-Undang itu pula lahirlah 10 propinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Sesuai dengan hal tersebut di atas maka di Sumatera Utara dilaksanakan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dan dibentuk suatu badan yang disebut Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh R. Sarimin Reksodiharjo. Tugas utama panitia ini adalah menjadikan daerah Keresidenan Sumatera Timur, Tapanuli dan Aceh menjadi suatu propinsi, seterusnya membagi atas kabupaten.

Setelah pemerintah pusat mengangkat seorang Gubernur untuk melaksanakan pemerintahan di Sumatera Utara maka pekerjaan panitia dianggap selesai. Oleh pemerintah pusat diangkat sebagai gubernur pertama Abdul Hakim. Di waktu pemerintahannya telah terbentuk kabupaten yang meliputi tiap keresidenan. Di Sumatera Timur terbentuk Kabupaten Langkat, Karo, Sima-

lungun, Asahan dan Labuhan Batu. Sedang di daerah Tapanuli adalah Kabupaten Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.

Masa pemerintahan Abdul Hakim berlangsung sampai tahun 1953. Pada akhir pemerintahannya terjadi peristiwa Tanjung Morawa di mana perkebunan digarap oleh penduduk sedang pihak perkebunan melakukan pentraktoran atas tanah tersebut. Tindakan pemerintah yang tegas menentang perongrongan tersebut disebabkan karena merugikan pihak perkebunan yang menghasilkan devisa bagi negara. Peristiwa itu mendapat tanggapan negatif dari partai tertentu, sehingga menjadi persoalan nasional, dan menyebabkan kabinet jatuh. Pengganti gubernur diangkat Mr. S.M. Amin, daerah propinsi Sumatera Utara diperkecil wilayahnya. Daerah Keresidenan Aceh berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 1956 ditingkatkan menjadi propinsi.

Sejak pembentukan propinsi Sumatera Utara perkembangan otonomi daerah semakin berkembang. Untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan maka secara bertahap berkembang pula beberapa kotamadya dan kabupaten. Pada tahun 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1964 terbentuk pula Kabupaten Dairi, yang dahulu merupakan sebagian kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 1956 juga diadakan perubahan tentang status beberapa kota. Medan, Pematangsiantar dan Sibolga menjadi kota besar, dan Binjai, Tanjung Balai, Tebing Tinggi menjadi kota kecil. Perubahan status ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Darurat No. 8 dan 9 tahun 1956.

Sesuai dengan kedudukan Sumatera Utara sebagai daerah otonomi Tingkat satu maka lahir pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di samping Gubernur dibentuk pula Dewan Pemerintah Daerah yang membantu Gubernur dalam tugasnya sehari-hari. Pada tiap daerah Kabupaten dibentuk pula Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dan kotamadya sebagai Daerah Otonom Tingkat II. Dengan berlakunya dekrit Presiden dalam Demokrasi Terpimpin maka bentuk Dewan Perwakilan Rakyat diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR sampai ke daerah.

Sesudah pemberontakan G-30-S/PKI maka bentuk dan

susunan pemerintahan di Sumatera Utara mengalami perubahan pula. Untuk melaksanakan stabilisasi pemerintahan maka diangkat sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara P.R. Telaumbanua. Tugas pejabat Gubernur yang baru adalah melaksanakan politik pemerintahan Orde Baru, yaitu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Berdasarkan cita-cita Orde Baru pada tahun 1971 diadakan pemilihan umum yang hasilnya memberikan suatu era baru bagi kehidupan pemerintahan di Sumatera Utara. Dari hasil Pemilu 1971 terbentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II yang mencerminkan cita-cita Orde Baru, yang terdiri dari 2 Parpol dan 1 Golkar sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1973.

Di samping perubahan dalam pemerintahan juga terjadi perubahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 1965. Undang-Undang ini mengenai Desentralisasi yang mengubah dan menghapuskan peraturan atau Undang-Undang sebelumnya. Walaupun demikian Undang-Undang tersebut mempunyai banyak kelemahan dan tidak cocok dengan perjuangan Orde Baru. Untuk kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang '45 secara murni dan konsekuen, maka MPR telah mengadakan peninjauan kembali Undang-Undang No. 18 1065. Dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN telah digariskan pokok-pokok pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dari Ketetapan MPR tersebut kemudian disusunlah Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang isinya antara lain:

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat terhadap seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama dengan asas dekonstrasi dengan memberikan pelaksanaan asas tugas pembantuan.

4. Pemberian otonomi bagi Daerah mengutamakan aspek kesejahteraan, di samping tujuan aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi bagi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa 2).

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 adalah pemberian otonomi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijaksanaan yang bertanggungjawab dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berdiam di wilayahnya. Dengan adanya peraturan itu maka pembangunan di daerah dapat berjalan serta peningkatan kehidupan rakyat.

Gubernur sebagai pimpinan eksekutif dengan Undang-Undang itu tidak lagi bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kedudukan pimpinan eksekutif di daerah tidak lagi dengan mudah dipengaruhi oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur lembaga di daerah selalu bertugas mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan pemerintahan Daerah maka Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah. Badan ini menyelenggarakan rumah tangga Daerah, urusan umum dan diatur oleh keputusan Gubernur. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari badan ini dikepalai oleh Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas operasional diangkat kepala Dinas seperti Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum dan sebagainya. Dengan adanya dinas tersebut maka gerak pembangunan di Daerah Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik dan program Repelita dapat dilaksanakan sampai ke Pedesaan. Untuk mengetahui keadaan daerah pedesaan dalam masa Pelita akan diuraikan tiga Daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Simalungun dan Deli Serang. Ketiga daerah tersebut dianggap mewakili Sumatera Utara karena tiap Kabupaten mempunyai ciri yang berbeda dan setiap Kabupaten mempunyai pula persamaan dengan Kabupaten lain, seperti adat-istiadat susunan masyarakat dan sebagainya.

2) Ibid., hal. 69.

1. Kabupaten Tapanuli Utara;

Tapanuli Utara terdiri dari dataran tinggi, banyak terdapat bukit dan iklimnya umumnya sejuk. Di daerah Siborong-borong iklimnya sejuk dan agak kering. Di daerah yang datar dan lembah ditanami dengan padi sedang daerah yang berbukit ditanami penduduk dengan karet dan kopi. Daerah ini terkenal juga sebagai daerah Tanah Batak Toba, berbatas dengan:

Utara dengan Kabupaten Dairi dan Simalungun.

Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Timur dengan Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu.

Barat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ibukota kabupaten ini adalah Tarutung, terdiri dari 27 kecamatan dan 871 buah desa. Penduduk pada umumnya terdiri dari suku Batak Toba. Di kota terdapat juga suku lain dari Indonesia tetapi jumlahnya kecil.

Mata pencaharian penduduk pada umumnya bertani, hasil utama adalah padi dan hasil perkebunan seperti karet, kopi dan kemenyan dan umumnya dijual ke daerah Sumatera Timur. Kebanyakan yang menampung hasil bumi itu adalah pedagang Cina yang tinggal di kota Kehidupan penduduk umumnya bergantung dari hasil bumi dan bila hasil bumi itu mendapat pasaran yang baik di luar negeri maka kehidupan penduduk menjadi baik pula.

Hasil padi hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok rakyat setempat. Sebagian besar penduduk hidup dari pertanian sawah, tetapi areal persawahan yang mereka miliki boleh dikatakan sangat terbatas. Hanya daerah yang berada di lembah atau daerah yang datar ditanami padi dan daerah yang umumnya berbukit atau lereng gunung. Karena sawah yang sangat terbatas maka penduduk Toba Batak banyak melakukan migrasi ke daerah kabupaten lainnya seperti Dairi, Simalungun dan Asahan.

Perpindahan ini sudah terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu antara penduduk Toba Batak dengan penduduk kabupaten di sekitarnya banyak mempunyai hubungan. Di daerah kabupaten yang berbatasan dengan Tapanuli Utara penduduk suku Batak Toba juga mengolah sawah karena daerah yang didatangi itu cukup subur.

Walaupun keadaan tanah kurang subur tetapi dalam bidang pendidikan sejak awal abad ke-20 telah menunjukkan kemajuan. Usaha zending Kristen yang dimulai sejak akhir abad 19, juga mengembangkan pendidikan.

Sejak permulaan kemerdekaan, dibandingkan dengan kabupaten yang lain, maka daerah Tapanuli Utara mempunyai sekolah terbanyak. Kebutuhan pendidikan telah merupakan suatu yang penting bagi penduduk di daerah ini. Penduduk semenjak tahun 1950 telah melakukan cara gotong royong mendirikan sekolah sehingga pemerintah dengan mudah meluaskan sarana pendidikan di daerah ini. Pada daerah kecamatan sebelum Repelita telah ada beberapa daerah yang mempunyai SMP, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta.

a. Kecamatan Balige

Kecamatan Balige menjadi bahagian Kabupaten Tapanuli Utara berbatasan dengan Danau Toba di sebelah utara, kecamatan Siborong-borong di sebelah selatan, sebelah timur dengan Kecamatan Laguboti dan di sebelah barat dengan kecamatan Siborong-borong. Sebahagian besar daerah ini terdiri dari bukit berbatu, hanya 1/4 bahagian tanahnya yang dapat dijadikan sawah dari jumlah 11.720 Ha.

Karena letaknya di dataran tinggi Toba maka udara yang sejuk juga terasa berpengaruh. Curah hujan banyak terjadi dari bulan September sampai Maret. Walaupun curah hujan hanya terjadi pada bulan tersebut sungai yang mengalir ke wilayah ini memberikan sumber bagi irigasi di daerah ini. Di sekitar daerah yang berbukit terdapat juga hutan tetapi tidak banyak seperti daerah yang berbatasan dengan wilayah Siborong-borong.

Penduduk yang mendiami kecamatan ini sebahagian besar adalah suku Batak Toba terutama yang tinggal di daerah pedesaan. Penduduk dari suku lain terdapat di ibu kota kecamatan Balige dan jumlah mereka kecil, hidup sebagai pegawai dan pedagang yang menampung hasil pertanian seperti padi, kemenyan dan karet. Hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama bagi penduduk adalah padi. Anak yang disekolahkan dari desa

3

3) Camat Balige *UDKP Wilayah Kecamatan Balige* Pola Tata Desa Kecamatan Balige 1980, hal. 12.

4)

ke kota pada umumnya membawa bekal beras. Jumlah penduduk menurut data tahun 1975 adalah: 31.825 orang. Kepadatan penduduk rata-rata 207 jiwa per Km², sedang Net density 437 jiwa/Km².³⁾

Penduduk Kecamatan Balige termasuk daerah kecamatan yang terpadat. Menurut data tahun 1972 pertambahan penduduk di Kecamatan itu adalah sebagai berikut:

Yang lahir	690 orang
Yang datang	82 orang
	<hr/>
Jumlah	772 orang
Yang meninggal	326 orang
Yang pindah	279 orang
	<hr/>
Jumlah	605 orang4)

Pertambahan penduduk di kecamatan Balige termasuk padat, dan karena itu dijadikan objek penelitian. Desa yang dipilih ialah Desa Napitupulu Bagasan, Desa Lumban Pea, Desa Balige III.

b. Desa Napitupulu Bagasan, Lumban Pea, Balige III

Yang dimaksud dengan desa di Tapanuli Utara adalah *huta* menurut pengertian masyarakat Batak Toba. Suatu *huta* adalah kesatuan teritorial yang berasal dari satu marga. Pengertian satu marga adalah satu keturunan menurut garis kebaapaan atau patriarkhat.

Di dalam buku *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Kuntjaraningrat mengatakan, bahwa,

"Setiap Huta itu dahulu dikelilingi suatu parit, suatu dinding tanah yang tinggi dan rumpun bambu yang tumbuh rapat"⁵⁾

Huta adalah suatu desa dalam arti umum yang terdapat di Indonesia. Istilah itu terdapat juga pada suku Batak Simalungun dan Mandailing. Istilah *huta* itu sebenarnya sama dengan pe-

4) *Ibid.*, hal. 18.

5) Kuntjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* Jambatan, Jakarta 1976, hal. 98.

ngertian *huta* yang berarti benteng dalam bahasa Sansekerta, karena biasanya merupakan tempat kediaman penduduk yang merupakan benteng untuk mencegah serangan dari pihak luar. Karena itu dibuat parit dan di antara parit itu ditanami dengan pohon bambu.

Perkataan *kuta* sampai sekarang di Aceh masih disebut untuk perkampungan. *Huta* di Tapanuli Utara sekarang telah tidak lagi terbiasa dikatakan untuk suatu desa tetapi lebih banyak dipakai dengan perkataan *kampung*, yang didirikan bersama oleh anggota desa yang berasal dari satu keturunan.

Sebagai perintis atau penagak *huta* dikenal dengan nama *Tungane Huta*. Seluruh desa di Tapanuli Utara dibentuk menurut cara itu. Dahulu kepala *huta* disebut *Raja Huta*, tetapi setelah masa kemerdekaan disebut kepala *kampung*. *Raja Huta* di Tapanuli Utara sebenarnya lebih banyak mengurus masalah adat di *huta* itu dan sedikit mengurus mengenai pemerintahan. *Raja Huta* lebih berfungsi sebagai sesepuh.

Ketiga desa, yaitu Napitu Bagasan, Lumban Pea dan Balige terletak di daerah dataran tinggi yang melandai ke danau Toba. Pada dataran tersebut terdapat sawah yang diairi dengan air hujan dan irigasi. Sungai kecil merupakan sumber air untuk sawah yang bermuara ke danau Toba.

Penduduk yang mendiami seluruh desa adalah suku Batak Toba, mereka rajin melakukan pertanian dan setiap jengkal tanah diusahakan tetapi karena kepadatan penduduk maka hasil yang dicapai tidak seberapa, sekedar dapat mencukupi kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Penduduk yang mendiami ketiga desa tersebut umumnya menganut agama Kristen Protestan, sedikit Islam dan Katholik.

Perkembangan pendidikan di ketiga desa tersebut sudah maju. Pengenalan pendidikan penduduk desa sama dengan pengenalan mereka terhadap agama Kristen. Melalui *Zending* didirikan sekolah desa. Kebanyakan dilakukan dengan swadaya masyarakat sendiri. Sebagian besar penduduk dahulu telah merasa puas kalau mereka dapat membaca dan menulis. Untuk melanjutkan pendidikan, kebanyakan meneruskan sekolahnya ke kota kecamatan, yaitu Balige yang sejak masa penjajahan merupakan kota pendidikan. Di sini terdapat sekolah yang diasuh oleh *zending* maupun organisasi masyarakat

Struktur pemerintahan desa, di ketiga desa itu setelah kemerdekaan tidak banyak mengalami perubahan. Raja Huta yang dahulu mengepalai huta sekarang menjadi Penghulu Kampung, yang mengurus keperluan desa seperti pengairan, pajak dan keamanan desa yang diselesaikan menurut adat setempat.

Dalam menyelesaikan masalah itu penghulu mendapat nasihat dari pengetua adat yang dinamai *Raja Adat*. Dengan kedudukan Penghulu yang demikian maka kebutuhan dalam administrasi tidak begitu banyak sehingga pegawai tidak diperlukan. Tidak ada staf yang turut membantu penghulu dan kantornya juga tidak ada. Kebanyakan tugas penghulu dilakukan di rumah saja, karena kedudukan Penghulu sebagai sesepuh saja. Keadaan ini berlangsung selama keadaan di desa tidak mengalami perubahan yang berarti.

Dalam menentukan kepala desa pada mulanya ditunjuk oleh atasan, ialah orang yang dianggap mempunyai pengetahuan mengenai adat atau sesepuh di desa itu yang diterima oleh masyarakat. Sistem pemilihan kepala desa diadakan setelah organisasi dan partai politik memasuki desa, pada sekitar tahun enam puluh.

Setelah tahun enam puluh terjadi perluasan pengaruh partai politik sampai ke desa. Untuk mendapat pengaruh di desa organisasi parpol berusaha mendekati tokoh yang terkemuka di kampung atau desa. Sesudah pemberontakan G-30-S/PKI, di Tapanuli Utara terdapat beberapa ormas dan parpol, antaranya Parkindo, Partai Katholik, Nahdlatul Ulama, IPKI dan PSII.

Walaupun pengaruh partai politik telah sampai dan menjangkau daerah pedesaan tetapi pengaruh pemimpin desa masih kuat. Setiap tindakan yang dilakukan di desa itu pengaruh Penghulu serta pemuka masyarakat lainnya seperti kaum adat, Ulama dan tokoh lainnya masih tetap menentukan. Dengan demikian maka jalannya pemerintahan di desa dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak masyarakat di desa itu.

Peranan organisasi politik dalam kehidupan desa di sekitar Kecamatan Balige boleh dikatakan tidak begitu besar pengaruhnya. Kegiatan organisasi politik yang kelihatan berpengaruh adalah organisasi agama seperti Parkindo. Organisasi politik ini berpengaruh karena sejalan dengan kehidupan penduduk pedesaan yang bersifat agraris dan taat kepada agama. Organisasi kepartaian

yang lain kurang mempunyai pengaruh dalam kalangan masyarakat karena penduduk tidak memahami tujuan organisasi itu dan tidak sesuai pula dengan tujuan hidup mereka itu. Kalaupun ada di desa tersebut anggota partai tetapi peranannya dalam kehidupan desa tidak besar.

Sebaliknya organisasi yang bersifat non politik seperti kegiatan masyarakat dalam organisasi tolong-menolong seperti STM (Serikat Tolong Menolong), organisasi adat dalam kelompok marga, organisasi pemuda dalam melaksanakan kegiatan di desa (*Naposo-bulung*) *besar pengaruhnya*. Organisasi inilah yang melakukan kegiatan dalam kehidupan sosial seperti kemalangan, perkawinan maupun gotong-royong mengerjakan sawah. Peranan organisasi non politik ini merupakan tulang punggung kekuatan desa.

Penghasilan utama penduduk adalah padi, kacang, dan jagung, di samping tanaman keras seperti kemenyan dan karet. Sawah dikerjakan secara tradisional yang menyebabkan hasil yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan sendiri. Kebutuhan utama dalam masyarakat di pedesaan sangat sederhana dan kekayaan seorang diukur dengan padi. Padi merupakan standar dari kehidupan penggunaan uang atau peredaran uang sedikit sekali. Kehidupan masyarakat berada dalam peralihan dari masyarakat yang mulai mengenal mata uang sebagai alat pembayaran. Pada hari pekan penduduk berbondong-bondong untuk membeli segala kebutuhannya untuk satu minggu, demikian pula mereka menjual hasil buminya ke pekan seperti damar, karet dan sebagainya. Peranan pedagang penggalas dalam masyarakat ini sangat besar.

Peranan uang dalam masyarakat ini sedikit sekali sehingga setiap keluarga petani menyimpan padi untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Misalnya dalam kebutuhan untuk pesta adat maka simpanan padi itu dijual, demikian pula untuk membiayai kebutuhan sekolah anak-anak. Keadaan perekonomian desa seperti ini berlangsung sampai lahirnya Orde Baru. Setelah Orde Baru mulai mengalami perubahan dengan adanya pembangunan pedesaan. Pengaruh pembangunan di desa melahirkan desa yang dinamis.

Kehidupan masyarakat desa diatur menurut tata krama adat melahirkan suatu perkembangan masyarakat yang sesuai dengan adat itu sendiri. Adat Batak mengikuti sendi *Dalihan na Tolu* (*Hula-hula, Boru* dan *Dongan Tubu*). Hula-hula, yaitu pemberi

anak dara, Boru pengambil anak dara dan Dongan Tubu ialah keluarga yang masih satu marga.

Setiap kegiatan sosial masyarakat desa diatur menurut susunan ketiga unsur itu. Misalnya dalam kegiatan perkawinan, kematian dan kegiatan keagamaan. Ketiga unsur itu merupakan *tungku tiga sejarangan* (untuk memasak) yang dengan kehadiran ketiga golongan itu maka segala kegiatan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik. Demikian pula dalam kegiatan mengusahakan pertanian seperti turun ke sawah atau melaksanakan panen padi, didasarkan juga kepada adat itu, ketiga unsur itu dapat melaksanakan suatu sumber dari kegotong-royongan dalam masyarakat pedesaan. Seorang anggota masyarakat tidak dapat terlepas dari ikatan yang tersebut di atas. Dengan tata kehidupan sosial masyarakat yang demikian itu maka kehidupan masyarakat desa itu dapat berjalan secara teratur tetapi tidak melahirkan suatu kemajuan yang berarti.

2. Kabupaten Simalungun

Kabupaten Simalungun terletak di daerah Sumatera Timur, berada di dataran tinggi Simalungun yang subur. Berbatas dengan Kabupaten Karo di sebelah utara, barat dengan Kabupaten Tapanuli Utara, timur dengan Kabupaten Deli Serang dan Selatan dengan Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu. Menurut keadaan tanahnya Simalungun dapat dibagi atas daerah Simalungun atas dan bawah.

Daerah Simalungun Bawah merupakan daerah dataran tinggi yang berbatas dengan kabupaten Deli Serdang dan Asahan dan kabupaten Labuhan Batu. Di daerah ini terdapat perkebunan dan persawahan. Simalungun Atas tanahnya agak berbukit-bukit dan dibandingkan dengan daerah Simalungun Bawah maka daerah ini kurang subur. Iklimnya yang agak sejuk memungkinkan adanya perkebunan teh dan pada daerah yang agak datar terdapat persawahan. Pada beberapa tempat seperti Seribu Dolok terdapat juga tanaman sayur-mayur dan buah-buahan.

Keadaan yang subur pada daerah Simalungun bawah menyebabkan sejak permulaan abadi ke 20 telah dibuka oleh pengusaha bangsa Eropa: perkebunan karet, sawit dan sisal. Di daerah ini terdapat perusahaan HVA (*Handels Vereeniging der Amsterdam*) dan *Good Year*. Guna keuntungan dan kepentingan perkebunan maka dibuka jaringan kereta api sampai ke daerah Simalungun.

Di daerah perkebunan banyak berdiam suku lain seperti suku Jawa yang didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi buruh di perkebunan Simalungun. Di samping suku Jawa kemudian juga banyak berdiam suku lainnya seperti Minang dan Batak Toba. Orang asing yang banyak tinggal di daerah adalah Cina dan India yang datang sejak daerah ini mengalami kemajuan akibat dibukanya perkebunan.

Di daerah sekitar Pematang Bandar, dahulu Belanda melakukan pembukaan daerah transmigran untuk suku Jawa dan daerah ini terkenal dengan nama daerah kolonisasi. Kedatangan dan perpindahan suku Jawa ke daerah ini mungkin untuk membangun persawahan agar padi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan perkebunan di Simalungun. Pada masa itu daerah perkebunan di Sumatera Timur harus mendatangkan beras dari luar negeri, karena daerah ini tidak menghasilkan bahan makanan. Sampai dewasa ini di sekitar Pematang Bandar masih terdapat sawah yang luas yang didiami oleh berbagai suku.

Daerah Simalungun bawah sekarang terdiri dari daerah Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Bandar, dan Siantar. Di daerah ini penduduknya rapat dan juga potensi ekonominya sangat baik. Hubungan lalu lintas di daerah ini lebih baik dari daerah yang lain, karena letaknya agak dekat ke pesisir. Penduduk yang mendiami daerah tersebut banyak yang menganut agama Islam, mungkin karena hubungan kebudayaan lebih erat dengan daerah pesisir jika dibandingkan dengan daerah Simalungun Atas.

Daerah Simalungun Atas terletak di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan sepanjang pesisir pantai Danau Toba. Di sini terdapat kecamatan Balata, Sidamanik, Dolok Pardamean, Raya, Panei Tengah, Silimakuta, Dolok Silau, Purba, Parapat, Dolok Maligas, Dolok Panribuan, Tanah Jawa, Raya Kahean. Penduduk yang mendiami daerah ini kebanyakan penduduk Simalungun dan di sepanjang perbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara juga banyak yang didiami oleh suku Batak Toba.

Daerah ini umumnya berbukit dan banyak lembah. Pada tempat yang dapat ditanami padi terdapat sawah yang diairi dengan irigasi. Banyak penduduk yang berasal dari daerah Kabupaten Tapanuli Utara di sini melakukan kegiatan pertanian besawah. Pada daerah yang berbukit ditanami kopi, kemiri, dan ceng-

keh. Daerah yang udaranya sejuk ditanami mayur seperti di Seribu Dolok.

Karena daerahnya kurang begitu subur maka keadaan kemakmuran penduduk di daerah ini agak berbeda dengan penduduk yang mendiami Simalungun Bawah. Perkebunan yang terdapat di daerah ini ialah perkebunan teh dan kelapa sawit. Perkebunan teh terdapat sekitar Sidamanik dan Bah Birong Ulu, kelapa sawit di Marihat dan di daerah menuju Parapat. Dibandingkan dengan daerah Simalungun Bawah maka areal perkebunan di daerah ini sangat kecil. Sarana lalu lintas juga kurang memuaskan dibandingkan dengan daerah Simalungun Bawah.

a. Kecamatan Siantar dan Bandar

Kecamatan Siantar terletak di luar wikayah Kotamadya Pematangsiantar. Sebelum perang daerah ini merupakan daerah yang berada dalam wilayah perkebunan Siantar Estate. Di sini terdapat perkebunan teh yang terkenal dengan perkebunan Martoba. Setelah masa pendudukan Jepang kedudukan perkebunan teh diperkecil dan tanah itu dibagikan kepada penduduk sebagai tanah garapan. Dengan demikian mulai terbentuk tempat kediaman penduduk dan perkampungan. Sebahagian besar tanah yang ada di sekitar bekas perkebunan itu digarap para karyawan perkebunan itu dan ada juga penduduk yang beradal dari daerah perkebunan sekitarnya seperti Sinaksak. Karena itu penduduk yang mendiami daerah itu pada mulanya banyak yang berasal dari suku Jawa tetap kemudian secara berangsur-angsur pindah pula suku lain seperti Batak dan Simalungun.

Perkebunan daerah ini sebagai daerah perladangan cepat berubah menjadi daerah pemukiman karena kepadatan penduduk yang terjadi di kota Pematangsiantar. Setelah kemerdekaan beberapa daerah yang dekat dengan batas kota Pematangsiantar telah pula menjadi perkampungan yang berada di bawah Kotamadya Pematangsiantar.

Sejak sekitar tahun lima puluh perkebunan *Siantar Estate* semakin menciut dan daerah perladangan yang telah menjadi daerah pemukiman itu kemudian menjadi suatu daerah sendiri dengan dibentuknya Kecamatan Siantar. Kantor Kecamatannya juga terletak di Kotamadya Pematangsiantar. Kecamatan ini mempunyai banyak desa, yaitu 33 buah, dan penduduknya rapat.

Daerah Kecamatan Bandar tumbuh dan berkembang karena pengaruh pertumbuhan perkebunan yang berada di sekitarnya. Sebelum pembukaan perkebunan penghasilan utama daerah Simalungun adalah perdagangan. Sejak lama daerah ini merupakan tempat pemukiman banyak pedagang. Orang Cina menyebut kota perdagangan ini dengan perkataan *Sam Pan Tau*. Sesudah pembukaan perkebunan maka lahirlah tempat pemukiman baru seperti Pematang Bandar, Laras, Bandar Betsy dan lain-lain. Sampai sekarang di kecamatan tersebut terdapat 33 buah desa. Banyak desa yang terdapat di daerah ini seperti Pematang Bandar dan Kandangan dibentuk sebagai desa transmigrasi dari masa penjajahan Belanda. Desa yang lain tumbuh sejalan dengan perkembangan perkebunan sekitarnya, karena banyak para buruh perkebunan setelah masa kontraknya selesai diam di daerah perkampungan sekitarnya dan memperoleh pula tanah garapan sehingga dengan keadaan demikian terbentuk suatu desa.

Penduduk desa kecamatan Bandar pada umumnya terdiri dari suku Jawa, Simalungun, Batak dan di kota juga terdapat orang Cina dan suku lain dari daerah Indonesia. Perkembangan Kecamatan Siantar dan Bandar yang terletak di daerah Simalungun Atas. Kedua kecamatan tersebut lebih maju karena jaringan lalu lintas yang sudah lebih baik.

b. Desa Tambun Nabolon, Kandangan, Pematang Keasan

Desa Tambun Nabolon adalah salah satu desa yang termasuk daerah kecamatan Pematangsiantar. Daerah ini dahulunya merupakan daerah perkebunan teh yang berada di bawah kekuasaan perkebunan *Siantar Estate*. Zaman Jepang karena kebutuhan akan tanah pertanian maka daerah ini diberikan kepada penduduk untuk diusahakan menjadi perladangan. Tanah bekas perkebunan itu kemudian ditanami penduduk dengan tanaman palawija dan padi.

Pertambahan penduduk di Kotamadya Pematangsiantar menyebabkan daerah ini cepat berkembang menjadi daerah pemukiman, sehingga terbentuk beberapa perkampungan kecil seperti Tambun Timur, Tambun II, Brombongan. Penduduk menjadikan daerahnya sebagai tempat menanam tanaman keras, misalnya cengkeh, buah-buahan dan karet. Jarak yang tidak berapa jauh dengan Kotamadya Pematang siantar menyebabkan daerah ini

setelah kemerdekaan berkembang menjadi daerah pabrik seperti remiling karet dan perbengkelan.

Sekarang sepanjang jalan menuju Siantar telah pula berdiri pabrik tapioka dan rokok. Di daerah yang agak jauh dari jalan raya terdapat juga sawah yang sumber airnya dari sungai sekitarnya. Penduduk yang mendiami daerah Desa Tambun Nabolon terdiri berbagai suku bangsa, seperti Simalungun, Jawa, Batak Toba dan Cina. Agama yang dianut sebahagian besar Islam dan Kristen. Kehidupan antar penduduk itu sangat baik terutama pada kegiatan untuk kepentingan bersama.

Di desa ini pendidikan sejak tahun 1950 dapat dikatakan belum berkembang disebabkan penduduk masih jarang dan pemukiman belum berapa banyak. Umumnya anak yang telah saatnya bersekolah memasuki sekolah dasar di kota Siantar. Pendidikan yang ada hanya madrasah yang dikelola oleh *Aljamiyatul Wasyliyah* hanya mencapai kelas tiga saja.

Sekolah yang diusahakan oleh pemerintah tidak terdapat di daerah ini. Tidak berkembang pendidikan juga karena masa itu perhatian masyarakat belum berkembang. Pendidikan keagamaan lebih menarik masyarakat daripada pendidikan umum. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan bukanlah syarat mutlak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Di samping itu pendapatan yang rendah tidak memungkinkan mereka untuk menyekolahkan anaknya dan anak-anak yang telah besar diikutsertakan membantu orang tuanya untuk mencari nafkah.

Desa Tambun Nabolon terbagi atas bahagian yang lebih kecil yang dipimpin seorang kepala yang disebut kepala kampung atau *Gamot*. Gamot hanyalah mengurus beberapa keluarga yang terdapat di daerahnya karena wilayah dan penghuni kampung itu sedikit. Kepala desa dari kampung itu tidak dipilih tetapi atas musyawarah dari anggota kampung yang bersangkutan. Biasanya yang menjadi kepala kampung adalah orang yang dianggap mampu menguasai kampung karena mengetahui adat-istiadat dan disegani oleh masyarakat. Gamot langsung dianggap sebagai pimpinan, baik formal maupun non formal dalam kehidupan masyarakat kampung yang kecil ini. Seluruh permasalahan seperti kematian, perkawinan, masalah tanah dan sebagainya langsung diurusnya.

Kehidupan organisasi dan partai politik tidak dikenal oleh masyarakat karena mereka yang memikirkan masalah kehidupan

hari-hari dan masyarakat masih bersifat tertutup. Jalan di kampung masih merupakan jalan setapak, hanya berapa kampung yang berada di jalan besar yang lebih maju keadaannya.

Sumber kehidupan penduduk yang utama ialah hasil sawah, ladang dan penghasilan buruh tani yang tanahnya tidak begitu luas. Banyak tanah di kampung itu milik penduduk kota Siantar dan penghuninya hanya sebagai buruh saja. Keadaan seperti ini tidak menguntungkan penduduk kampung karena segala hasil yang diperoleh dari kampung itu tidak dimanfaatkan di kampung itu tetapi dibawa oleh penduduk kota. Keadaan ini menjadikan desa itu tidak mengalami perubahan. Penduduk yang memiliki tanah sendiri tidak mempunyai penghasilan yang lebih baik karena sistem pengolahan tanahnya masih meneruskan cara tradisional. Segala hasil yang diperoleh tidak mencukupi untuk hidupnya. Di masa tidak bekerja di sawah atau ladang mereka terpaksa mencari pekerjaan sebagai buruh harian pada perkebunan sekitarnya, atau merantau keluar daerah.

Desa Kandangan terletak di Kecamatan Bandar, yang jauhnya kira-kira 30 km dari ibu kota Pematangsiantar. Daerah ini dahulu pada masa pemerintahan jajahan merupakan daerah transmigrasi penduduk dari pulau Jawa. Daerah ini termasuk daerah dataran rendah yang luas dan sekitarnya terdapat perkebunan karet dan kepala sawit. Persawahan yang terdapat di sekitar daerah ini telah teratur dan dialiri oleh pengairan irigasi yang teratur.

Pada mulanya penduduk daerah ini sebagian besar terdiri dari suku Jawa, tetapi kemudian datang pula penduduk dari daerah Batak Toba yang bermukim di daerah ini. Hal ini disebabkan karena daerah tersebut sangat menarik bagi suku Batak Toba yang pada umumnya tertarik pada kehidupan pertanian dan persawahan. Dibandingkan dengan daerah lainnya boleh dikatakan penduduk daerah ini lebih baik karena hasil persawahan yang teratur dan memperoleh air irigasi.

Jalan di desa ini sebelum adanya Pelita boleh dikatakan hanya jalan dari tanah yang diberi batu untuk pengerasan. Bila hujan jalan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan, lubang penuh dengan air. Hubungan dengan jalan propinsi telah beraspal kira-kira 5 km.

Sebelum terbentuknya Desa Kandangan desa itu terdiri dari kampung yang dikenal dengan Kampung I, II dan III. Pembagian ini mungkin sebagai suatu bentuk permulaan dari transmigrasi suku Jawa. Perumahan dan sistem pengaturan kampung mempunyai banyak perasaan dengan daerah tempat asal mereka dahulu.

Kedaaan dan kehidupan penduduk dan umumnya petani menunjukkan perkembangan pendidikan di desa ini. Masa penjajahan Belanda, hanya ada sebuah sekolah saja, yaitu *Volk school* dan letak sekolah ini di Pematang Bandar. Keadaan pendidikan di desa Kandangan sampai sekitar tahun lima puluh belum menunjukkan kemajuan. Setelah itu mulai berkembang sekolah dasar dan madrasah. Sekolah dasar terdapat satu buah demikian juga madrasah yang berada di bawah naungan Al Jamiyatul Washliyah. Perhatian terhadap pendidikan setelah tahun tersebut terjadi karena hubungan antara desa dengan kota semakin baik setelah lenyapnya penjajahan, dan adanya perkebunan sekitarnya yang meminta tenaga terdidik. Pengaruh ini tidak begitu besar karena perhatian mereka hanya untuk dapat menyelesaikan sekolah dasar saja. Dengan tidak buta huruf mereka akan dapat bekerja sebagai buruh di perkebunan. Karena itulah maka di kalangan penduduk setempat tidak ada perlombaan untuk menyekolahkan anaknya ke kota untuk memasuki sekolah umum.

Sebelum adanya peraturan pemerintahan desa di kampung berlaku peraturan setempat, kepala kampung terus menerus memangku jabatan itu. Kepala kampung tugasnya lebih banyak melaksanakan pengabdian sebab tidak mempunyai penghasilan dari jabatannya. Kepala kampung tugasnya hanya melaksanakan instruksi dari Camat secara insidental seperti pencacahan jiwa, penyuntikan penduduk dan sebagainya.

Tugas kepala kampung lebih banyak memelihara ketenteraman kampung, mengatasi perselisihan dalam pembagian air untuk sawah. Dalam kehidupan kampung yang demikian peranan pemimpin masyarakat senantiasa menentukan. Tokoh masyarakat informal senantiasa diundang oleh penghulu untuk diminta pendapatnya atau turut serta mengatasi masalah yang terdapat di kampung. Keputusan pemimpin informal seperti ulama, tokoh adat sangat menentukan, karena masyarakat hanya berpedoman pada ketentuan pemimpin. Keadaan seperti itu menyebabkan kampung

menjadi statis dan tidak banyak berhubungan dengan masyarakat lainnya.

Pengaruh organisasi non politik maupun politik terhadap kehidupan kampung itu boleh dikatakan tidak banyak. Mereka tidak mengerti adanya pembahagian kelompok masyarakat dalam partai politik yang tumbuh di ibu kota kabupaten dan berkembang ke daerah pedesaan. Para pemimpin partai mendekati tokoh non formal sehingga dengan demikian dapat menguasai rakyat karena penduduk di pedesaan tidak mengerti politik. Kalau partai politik di desa hanya sebagai lambang saja maka organisasi yang bersifat non politik maupun politik terhadap kehidupan kampung itu boleh dikatakan tidak banyak. Mereka tidak mengerti adanya pembahagian kelompok masyarakat dalam partai politik yang tumbuh di ibu kota kabupaten berkembang ke daerah pedesaan. Para pemimpin partai mendekati tokoh non formal, sehingga dengan demikian dapat menguasai rakyat, karena penduduk di pedesaan tidak mengerti politik. Kalau partai politik di desa hanya sebagai lambang saja maka organisasi yang bersifat non politik lebih menonjol. Misalnya di desa Kandangan sejak dahulu telah berkembang "Serikat Tolong Menolong" atau STM. Persatuan Kesenian Jawa yang mengorganisasi pertunjukan wayang, ludrik dan sebagainya. Organisasi ini menunjukkan kegiatannya dalam peristiwa kemalangan, perkawinan dan hari besar negara. Kegiatan organisasi ini lebih menyentuh kehidupan langsung penduduk pedesaan dengan menikmati hiburan.

Hasil pertanian utama di desa Kandangan adalah padi, yang telah menggunakan sistem pengairan yang lebih baik dan teratur. Pengairan telah dibangun sejak zaman pemerintahan Belanda, karena hubungan yang tidak begitu lancar ke kota dan penduduk kurang pendidikan, maka hasil pertanian yang diperoleh tidak memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa itu.

Pembangunan koperasi tidak mendapat perhatian penduduk baik berupa koperasi pertanian maupun simpan pinjam. Penduduk lebih tertarik kepada tengkulak karena berurusan dengan mereka tidak berbelit-belit dan tujuan yang diharapkan tercapai. Selain itu pengertian mereka mengenai koperasi juga belum ada. Petani pada musim panen sebagian besar membayar hutang mereka kepada tengkulak, yang dilakukan oleh pedagang penggalas. Selain itu para petani itu juga membeli barang kebutuhannya seperti

pakaian dengan harga yang mahal dan melalui pedagang penggalas karena tidak adanya pasar yang terdekat. Karena kehidupan yang sulit di desa maka banyak penduduk kampung pergi ke kota mencari pekerjaan.

Banyak juga petani yang mendapatkan sawah untuk memelihara ikan. Walaupun demikian hasilnya tidak memuaskan karena pentunjuk dan bimbingan tidak mereka peroleh. Perikanan darat berkembang hanya sekedar menutupi kebutuhan mereka akan ikan.

Situasi perekonomian yang sulit di desa Kandangan mempengaruhi kehidupan sosial budaya penduduk. Kegiatan kesenian dalam masyarakat di desa Kandangan terbatas sekali. Kegiatan seperti wayang hanyalah dilakukan pada saat tertentu saja, seperti peringatan tujuh belas Agustus atau waktu acara perkawinan. Gerak kehidupan sosial budaya dalam masyarakat tidak berkembang. Walaupun demikian mereka tidak menunjukkan kegelisahan karena bagi penduduk desa waktu itu kebutuhan yang utama hanyalah sandang dan pangan yang sederhana.

Desa Pematang Krasaan terletak di jalan raya Pematangsiantar dengan Perdagangan. Jalan yang melintas desa itu telah diaspal dan baik, karena di desa ini dahulu terdapat perkebunan karet dan persawahan yang telah menggunakan irigasi. Daerah ini termasuk Kecamatan Bandar, yang dahulu menjadi daerah transmigrasi. Sawah tidak seluas desa Kandangan Karena Kandangan merupakan dataran rendah. Tanahnya merupakan endapan yang subur dan baik untuk pertanian. Karena itu masa penjajahan Belanda di daerah ini terdapat perkebunan karet.

Penduduk yang mendiami daerah ini terdiri dari suku Jawa, Simalungun dan Batak Toba. Sesuai dengan keadaan alamnya maka kehidupan penduduk yang utama adalah pertanian. Ada juga yang menjadi pedagang tetapi hanya pedagang sayur-mayur yang membawa hasil desa ini ke kota dengan mengendarai sepeda.

Pendidikan baru dikenal pada sekitar tahun lima puluh. Sebelum itu anak-anak yang ingin bersekolah harus ke Bandar karena satu-satunya sekolah yang terdapat di daerah ini. Setelah tahun 1950 baru didirikan sekolah dasar di desa ini, sekolah swasta adalah sekolah madrasah. Madrasah mendapat perhatian dari penduduk karena mereka menganggap dengan belajar di madrasah mereka dapat mempelajari agama dan dapat pula mem-

baca dan menulis. Sebahagian besar penduduk lebih tertarik kepada pendidikan agama daripada pendidikan umum. Hal ini kemungkinan sekali karena hubungan mereka lebih rapat ke daerah pesisir dari ibu kota Kabupatennya. Di daerah pantai seperti Batu Bara dan Asahan sejak dahulu berkembang pesantren yang mengajarkan Tasauf.

Sebelum tahun lima puluh di desa Krasaan hanya ada madrasah yang diasuh oleh Al Jamiyatul Washliyah saja. Sesudah tahun 1950 didirikan sekolah dasar satu buah. Bagi tamatan Sekolah Dasar dapat meneruskan sekolah untuk mendalami masalah agama. Kebanyakan yang melanjutkan pelajaran sesudah tamat Sekolah Dasar ke sekolah umum kebanyakan anak-anak yang beragama Kristen. Bagi penganut agama Islam banyak melanjutkan pelajarannya tetapi ke sekolah agama seperti Pendidikan Guru Agama atas atau PGA.

Kepala Desa di Krasaan pada tahun lima puluh adalah penghulu yang telah diangkat pada zaman raja dahulu. Karena dianggap tokoh yang terkemuka maka rakyat dapat menerima kedudukannya itu. Pada waktu itu tugas penghulu tidak banyak, ia hanya petugas perantara dari Camat dengan rakyat. Karena tugasnya tidak banyak maka dalam melaksanakan tugas ia tidak mempunyai pembantu, kantornya juga tidak ada dan segala urusan diselesaikan di rumah. Keadaan ini berlangsung sampai tahun enam puluh.

Setelah tahun enam puluh terjadi perubahan. Pengaruh partai politik masuk ke desa. Di desa Krasaan terjadi penggantian tokoh sesuai dengan keinginan partai politik yang berkuasa waktu itu. Kedudukan penghulu tetap demokratis, tokoh ulama dan tokoh adat tetap diikuti-sertakan dalam mengambil keputusan di desa. Kedudukan tokoh masyarakat tidak dapat diabaikan karena kepercayaan masyarakat lebih besar terhadap mereka itu. Partai politik yang tumbuh di desa berusaha mempengaruhi tokoh tersebut.

Penduduk desa Krasaan juga hidup dari hasil pertanian padi, sayur mayur dan tanaman keras seperti karet. Hasil sawah merupakan hasil yang utama, tetapi belum dapat memberikan kehidupan yang memuaskan. Para petani banyak yang terikat kepada pengijon. Padi telah dijual sebelum panen berhasil sehingga penduduk

sering terlibat dengan hutang. Untuk mengatasi kehidupan yang demikian petani ada yang menjual hasil sayur dan buah-buahan-nya di waktu tidak musim panen.

Lalu lintas sudah agak baik karena daerah ini dilalui jalan raya. Kehidupan yang sederhana itu menyebabkan kegiatan sosial budaya tidak berkembang, kecuali perkumpulan sosial seperti Serikat Tolong Menolong dan Perkumpulan Wirid Yasin.

Kegiatan kesenian hanya kelihatan dalam acara perkawinan atau perayaan. Bagi kelompok suku Jawa dalam pesta tertentu sering dipertunjukkan acara kesenian seperti wayang dan ludruk. Umumnya kegiatan kesenian ini berlangsung tidak saja dalam kalangan yang tidak mampu. Tidak jarang terjadi sesudah pesta perkawinan itu mereka dijerat oleh hutang. Kegiatan kesenian pada suku Batak dan Simalungun seperti Tor Tor juga diadakan waktu upacara yang berhubungan dengan adat.

Kesulitan hidup tidak begitu dipikirkan oleh penduduk, mereka telah menerima kenyataan hidup itu. Cara pemikiran mereka sangat sederhana karena pengaruh lingkungan. Karena itu koperasi yang dibentuk pada tahun lima puluh tidak pernah mendapat tempat di desa ini.

3. Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang adalah suatu daerah yang hampir seluruhnya merupakan dataran rendah dan sebagian yang berbukit-bukit. Daerah ini di sebelah utara berbatasan dengan propinsi Aceh dan kabupaten Langkat, sebelah selatan dengan Kabupaten Simalungun dan Asahan sebelah barat dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Daerah Deli Serdang sangat subur karena sungai yang mengalir ke Selat Malak seperti sungai Ular dan sungai Padang membawa lumpur dan lumpur itu kemudian mengendap di kiri kanan sungai dan di sepanjang muara sungai. Endapan lumpur kuga menyebabkan daerah pantai timur makin lebar dan ditumbuhi oleh pohon bakau terutama di daerah rawa.

Di daerah ini terdapat banyak perkebunan seperti perkebunan tembakau, karet dan kepala sawit. Luas daerah Deli Serdang adalah 4824 km² dan merupakan daerah yang luas di antara kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara. Daerah ini dahulu

merupakan daerah Kesultanan Serdang dan Kesultanan Deli.

Pada akhir tahun 1900 pengusaha asing memperoleh hak konsensi untuk membuka kebun di daerah ini. Hasil perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan itu sangat memuaskan. *Deli Maatschappij*, dengan kebun tembakau berhasil memperoleh keuntungan yang cukup baik, sehingga kemudian lahir pula beberapa perusahaan lain yang melakukan penanaman modal di daerah ini dengan menanam berbagai tanaman seperti karet dan kelapa sawit. Dengan hasil perkebunan ini maka mereka membangun jalan-jalan kereta api dan jalan raya.

Pemerintah Hindia Belanda juga menaruh perhatian terhadap pembangunan jalan raya karena daerah ini banyak memberikan pemasukan uang. Pada waktu itu tanah Deli terkenal sebagai daerah dollar karena pengaruh adanya perkebunan di daerah ini yang juga menarik para pendatang.

Orang Cina datang ke Deli pada mulanya sebagai pekerja di perkebunan karena Belanda menghadapi kesulitan buruh. Melalui Penang mereka berhasil mengadakan perjanjian dengan beberapa perusahaan yang menyediakan tenaga kerja. Pekerja Cina yang didatangkan itu banyak berasal dari daerah propinsi *Kwantung* dan *Hokian*.

Orang *Kwantung* kebanyakan berasal dari suku *Kong Hu*, dari propinsi *Hokian* suku *Tio Chiu*, *Kohiek* atau *Hakka* dan sebagainya. Orang Cina datang secara berkelompok dengan pimpinan kepala suku mereka. Pada umumnya mereka bekerja dipimpin oleh kepala sukunya. Dengan pimpinan kepala sukunya mudah bagi perkebunan untuk memerintah mereka. Kepala suku itu disebut *tandil* atau mandur di kebun. Orang Cina rajin bekerja dan hemat, mereka cepat mengubah kedudukan mereka dari buruh kebun menjadi tukang dan pedagang kecil. Dalam waktu singkat mereka meninggalkan kebun dan mendiami kota-kota kecil di Deli Serang. Di kota itu mereka bekerja sebagai tukang, pedagang kelontong, dan dalam waktu singkat mereka berhasil membentuk golongan menengah di kota-kota.

Bersamaan dengan kedatangan orang Cina maka datang pula buruh dari India yang dikenal di sini dengan sebutan Keling. Jumlah mereka tidak begitu banyak, tetapi mereka tidak dapat mengubah kehidupannya dengan cepat. Karena buruh Cina kemu-

dian berkurang sedang perluasan perkebunan berlangsung terus maka pihak perkebunan mulai mendatangkan buruh dari Jawa. Penduduk Deli Serdang yang dahulu terdiri dari Suku Melayu dan Karo, dengan pembukaan perkebunan terdapat pula suku Jawa dan orang asing seperti Belanda, Cina dan India.

Menurut perhitungan sensus tahun 1961 penduduk Deli Serdang berjumlah 962.000 jiwa, sedang sensus kemudian pada tahun 1969 terjadi kenaikan, yaitu 1.161.000 jiwa⁶⁾. Penduduk Deli Serdang merupakan daerah yang terdapat penduduknya. Kepadatan penduduk melahirkan akibat yang tidak menguntungkan, seperti penggarapan tanah secara liar terhadap areal perkebunan. Masalah itu merupakan suatu permasalahan yang timbul dan berlangsung dalam beberapa tahun sampai masa kini. Pemecahan masalah ini sangat sulit karena di satu pihak pengecilan perkebunan berarti suatu pengurangan devisa negara sedang di pihak lain pertambahan penduduk memerlukan suatu lapangan kerja yang satu-satunya hanya pertanian.

Mata pencaharian penduduk daerah ini selain menjadi pekerja di perkebunan juga menjadi petani dan nelayan. Daerah pertanian sangat sedikit yang dapat dikerjakan. Di sepanjang pantai terdapat sawah penduduk yang dikerjakan hanya pada saat musim hujan (sawah tadah hujan). Ada juga sawah yang menggunakan irigasi tetapi sangat sedikit, seperti di daerah Dolok Masihul sekitar Lubuk Pakam.

Disepanjang pantai penduduk melakukan penangkapan ikan seperti di daerah Percut, Pantai Cermin, Sialang Buah dan Pagurawan. Sebelum Pelita panen hanya sekali dalam satu tahun, dan tidak memakai pupuk. Demikian pula hasil palawija tidak dapat memberikan sumber penghasilan tambahan.

Pendapatan petani hanya cukup untuk menutupi kebutuhan mereka sendiri, malahan ada beberapa desa mengalami paceklik untuk mencukupi kebutuhan hidup. Banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh di perkebunan yang dekat dengan desanya. Keadaan demikian juga terdapat di daerah tempat pemukiman

6) Pemerintahan Sumatera Utara, *Almanak Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara*, Medan 1979, hal 1003.

para nelayan. Mereka menangkap ikan dengan alat tradisional seperti sampan, pukot dan pancing. Dengan alat itu mereka tidak dapat menangkap ikan agak ke tengah laut dan tentu saja hasil penangkapan tidak mencukupi dan kadang kala tidak ada bila keadaan laut tidak memungkinkan. Dengan penghasilan yang sedikit mereka terikat pula oleh ijon yang telah tumbuh dalam masyarakat desa pantai ini.

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang belum begitu baik, kota Kabupaten hanya terdapat sebuah SMP yang diasuh oleh swasta, kecuali di Pancur Batu terdapat SMP Negeri. Di daerah pedesaan jarang terdapat sekolah dasar dan di sepanjang pantai banyak terdapat madrasah. Perhatian terhadap pendidikan tidak begitu banyak. Anak-anak yang telah dapat membaca dan menulis membantu orang tuanya sebagai nelayan. Keterbelakangan dalam pendidikan menyebabkan perubahan dalam masyarakat lambat terjadi.

Dalam mengatasi persoalan tersebut pemerintah belum banyak dapat berbuat, karena pada waktu itu dana yang tersedia sedikit. Selain dari itu pemerintah daerah senantiasa diganggu oleh adanya penyerobotan tanah perkebunan yang disponsori oleh PKI dan ormasnya pada zaman Orde Lama.

Banyak penduduk pedesaan yang melakukan urbanisasi ke kota yang terdapat di daerah Kabupaten Deli Serdang. Kota Medan dalam waktu singkat mencapai jumlah penduduk 1 juta jiwa setelah tahun 1968, sedang pada pemilihan umum yang pertama hanya sekitar 479 ribu jiwa.

a. Kecamatan Percut Sungai Tuan, Senembah Tanjung Muda Hilir

Kecamatan Percut Sungai Tuan terletak kira-kira di sebelah timur laut Kota Medan. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur dengan Kecamatan Batang Kūwis, sebelah barat dengan Kecamatan Labuhan Deli dan Kotamadya Medan, sebelah selatan dengan Kecamatan Patumbak dan Tanjung Morawa. Daerah ini merupakan dataran rendah yang menjorok ke daerah pantai.

Sungai yang mengalir dari daerah Kecamatan Tanjung Morawa dan Patumbak bermuara di Percut. Di muara sungai terbentuk paluh yang ditumbuhi oleh bakau. Daerah ini subur karena sungai yang mengalir pada musim hujan meninggalkan lumpur yang subur

di sisi kiri kanan sungai, dahulu daerah ini sebahagian besar ditanami tembakau. Areal perkebunan tembakau dahulu luas sekali, tetapi sekarang mengecil karena perluasan perkampungan penduduk. Tempat tinggal penduduk dahulu sebagian besar berada di daerah pantai sehingga desa Percut itu merupakan desa pantai.

Daerah yang diusahakan perkebunan terdapat juga tempat pemukiman para karyawan. Penduduk yang mendiami desa pantai terdiri dari suku Melayu sedang yang mendiami daerah pemukiman yang disediakan oleh perkebunan sebagian besar adalah suku Jawa, pada masa penjajahan Belanda. Dewasa ini keadaan telah berubah, daerah Kecamatan Percut Sungai Tuan telah didiami oleh berbagai suku bangsa dan perkembangan telah bertambah banyak. Mata pencaharian penduduk daerah ini adalah menangkap, buruh tani, petani yang memiliki tanah dan para pedagang kecil atau penggalas.

Kecamatan ini mempunyai hubungan yang lancar dengan daerah lain, karena lalu lintas jalan raya telah cukup banyak. Jalan itu ada yang telah diberi batu dan ada yang masih merupakan jalan tanah. Pada sekitar tahun lima puluh ada beberapa bus angkutan yang menghubungkan desa ini dengan Kotamadya Medan. Di samping itu angkutannya disediakan oleh perkebunan untuk para karyawan.

Keadaan pemerintahan dan strukturnya dahulu termasuk daerah Kesultanan Deli, yang disebut daerah *kejuruan* dari Kesultanan Deli, setingkat onder district, Daerah *Kejuruan* dikepalai oleh pimpinan yang bertanggungjawab kepada atasan yang disebut *Datuk*. *Datuk* berkedudukan di Labuhan Deli yang membawahi beberapa daerah *kejuruan*, di bawah *kejuruan* terdapat kampung atau desa.

Setelah merdeka struktur ini dihapuskan dan daerah ini menjadi daerah Kecamatan yang disebut Kecamatan Percut Sungai Tuan. Daerah kecamatan ini lebih luas dan membawahi kampung yang lebih banyak karena setelah kemerdekaan perkampungan di daerah ini tumbuh dengan pesat. Sejak daerah itu menjadi daerah kecamatan perkembangannya cepat sekali karena daerah perkebunan yang dikerjakan petani kemudian menjadi daerah perkampungan dan statusnya telah mendapat pengesahan pula dari pemerintah.

Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hilir terletak di daerah dataran rendah. Daerah ini sebagian besar merupakan daerah perkebunan, dan desa yang terdapat di sini dikelilingi oleh kebun. Dahulu daerah ini ditanami tembakau tetapi sekarang telah diubah menjadi tanaman kepala sawit.

Perkembangan pada mulanya tidak begitu banyak, tetapi setelah terjadinya penggarapan tanah oleh penduduk maka tumbuh beberapa desa baru. Keadaan tanah daerah ini tidak begitu baik untuk penanaman padi karena sungai yang mengalir umumnya terjal dan tidak mungkin digunakan untuk mengairi. Selain itu musim kemarau curah hujan sedikit sehingga tidak mungkin menanam padi ladang atau tegalan.

Tanaman yang ditanam di daerah ini adalah tanaman keras seperti cengkeh, kopi, karet dan buah-buahan. Tanaman palawija seperti kacang, jagung juga terdapat di daerah ini yang ditanam di lembah yang agak subur dan ditanam setelah masa tanam padi. Daerah ini boleh dikatakan terisolasi karena terletak bukan di daerah urat nadi lalu lintas yang ramai. Jalan raya yang terdapat di daerah ini hanya jalan perkebunan yang hanya berfungsi untuk mengangkat hasil perkebunan. Karena keadaan yang demikian maka Kecamatan ini jauh ketinggalan.

Penduduk yang mendiami daerah ini terdiri dari suku Malayu dan di daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa agak ke pedalaman didiami oleh suku Karo. Suku Jawa banyak tinggal di perkebunan dan bekerja sebagai buruh perkebunan. Keadaan terisolasi ini mengakibatkan kemajuan pendidikan penduduk di daerah ini juga agak ketinggalan.

Daerah ini masa penjajahan Belanda berada di bawah kekuasaan Kesultanan Serdang dan desa yang berada di daerah ini berada di bawah seorang pimpinan yang disebut *Orang Kaya*. Orang Kaya bertanggungjawab mengenai kebijaksanaan pemerintahan kepada Sultan. Sesudah mereka daerah ini berada dalam suatu Kecamatan yang disebut Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hilir.

b. Desa Percut, Sungai Rotan dan Tungkuson

Desa Percut terletak di daerah Kecamatan Percut Sungai Tuan yang merupakan desa pantai. Berbatasan sebelah utara dengan

Selat Malaka, sebelah Selatan dengan desa Bandar Selamat, sebelah timur dengan daerah sungai Putih dan sebelah barat dengan daerah Tanah Merah. Di tengah desa mengalir sungai Jering yang berasal dari daerah Deli Tua dan Tanjung Morawa. Sungai ini dahulu merupakan urat nadi lalu lintas yang penting sebelum adanya lalu lintas darat. Kalaupun ada jalan darat pada sekitar tahun lima puluh masih merupakan jalan tanah yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan pada musim kemarau.

Desa Percut dahulu dikelilingi oleh perkebunan tembakau di selatan di utara terdapat pantai yang berawa dan ditumbuhi oleh tanaman bakau. Tempat kediaman penduduk mengikuti jalur sungai sampai ke muara sungai. Sekitar perkampungan penduduk juga terdapat tanah pertanian yang ditanami oleh kelapa dan daerah yang mungkin dijadikan sawah ditanami padi. Tanaman tersebut bukan merupakan mata pencaharian penduduk yang utama, tetapi sambilan.

Mata pencaharian pokok ialah menangkap ikan dan kehidupan sebagai nelayan telah turun temurun dan cara penangkapan dilakukan secara tradisional karena hubungan dengan daerah lain agak sulit. Sekolah Dasar hanya ada satu di Percut sebagai kelanjutan dari sekolah *Volkschool*. Pada sekitar tahun lima puluh sekolah itu telah diperluas menjadi enam kelas. Walaupun demikian perhatian penduduk tidak begitu besar terhadap pendidikan. Mereka memasuki sekolah sekedar dapat mengetahui cara menulis dan membaca saja dan sesudah itu terjun bekerja sebagai nelayan.

Sekolah agama di samping sekolah dasar negeri juga terdapat di desa ini yang dikelola oleh Al Jamiyatul Washliyah. Terhadap pendidikan agama penduduk menaruh minat tetapi itu pun sekedar sampai tamat belajar pada tingkatan rendah saja. Keadaan inilah yang menyebabkan desa ini sampai tahun lima puluh tidak mengalami banyak perubahan. Walaupun jaraknya tidak jauh dari kota Medan.

Pada tahun lima puluh desa ini merupakan suatu daerah Kepenghuluan dari Kecamatan Percut Sungai Tuan, dan yang menjabat sebagai penghulu pada tahun itu ialah Maksum. Kedudukan penghulu itu diperolehnya sejak masa pemerintahan Sultan Deli dan setelah kemerdekaan ia meneruskan jabatan tersebut. Kedudukan sebagai penghulu dilanjutkan karena mayoritas pen-

duduk terdiri dari suku Melayu yang menganggap bahwa ia dapat melaksanakan adat-istiadat dan kebiasaan penduduk suku Melayu.

Kedudukan sebagai penghulu setelah tahun 1955 ia diganti oleh Mahidin, pengangkatan terjadi setelah Pemilu yang pertama. Pada waktu itu peranan partai politik itu tidak sampai mempengaruhi penduduk pedesaan, karena daerah sekitar desa Percut telah mulai mengalami perubahan. Tanah perkebunan telah mulai pula menjadi sasaran garapan rakyat, perkampungan baru terjadi pula di sekitarnya dan penduduk dari daerah lain banyak pula bermukim ke desa tersebut. Sekarang di desa itu tidak saja didiami oleh suku Melayu sebagai mayoritas tetapi juga suku terdapat di daerah ini. Penduduk pendatang itu tidak saja hidup sebagai nelayan dan penggalas. Kehidupan desa Percut yang dahulu kurang berkembang sekarang telah mulai berkembang.

Penduduk pendatang baru berhasil mendiami daerah yang dahulunya rawa dan kemudian dijadikan sebagai tempat pemukiman atau sawah. Desa Percut sekarang tidak lagi desa tertutup tetapi telah mempunyai hubungan dengan daerah sekitarnya terutama kota Medan. Jalan mulai diperlebar dan diperkeras dengan batu, karena hasil bumi yang telah mengalir ke kota. Pertumbuhan desa sepanjang jalan raya itu semakin banyak pula. Sesudah tahun 1967 di desa Percut terjadi pula penggantian penghulu dari Mahidin ke Marsum Batu Bara.

Desa Sungai Rotan masuk dalam wilayah Kecamatan Percut Sungai Tuan, tetapi desa ini bukanlah suatu desa yang telah berdiri sejak masa pemerintahan Kesultanan Deli. Pada mulanya berasal dari tanah milik perkebunan, yang kemudian dilepaskan oleh perkebunan dari areal pengusahaannya.

Sesudah tahun lima puluh pertambahan penduduk yang cepat memerlukan pula daerah pemukiman yang baru. Tanah ladang yang berasal dari daerah perkebunan kemudian dijadikan menjadi daerah perkampungan. Banyak sekali kampung terbentuk sesudah tahun lima puluh. Pada tahun tersebut status desa itu masih merupakan bagian dari Kepenghuluan (Desa) Bandar Khalipah. Yang menjadi penghulu di desa Bandar Khalipah waktu itu ialah Saleh Ibrahim dan sebagai kepala lorong di desa sungai Rotan yang sekarang ialah Abdul Rahman.

Lorong yang mulanya hanya terdiri dari beberapa rumah yang didiami oleh sejumlah keluarga kemudian mengalami perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan keadaan lorong. Karena hal tersebut maka pada tahun 1958 status Lorong untuk Sungai Rotan berubah dan dinyatakan keluar dari wilayah kampung (desa) Bandar Khalifah. Sejak itu Sungai Rotan berstatus sebagai kampung atau desa.

Desa Sungai Rotan ini merupakan daerah dataran rendah dan dikelilingi oleh perkebunan. Penduduk yang mendiami daerah ini umumnya hidup sebagai petani dan pedagang sayur. Karena jaraknya tidak begitu jauh dari kota Medan maka sebagian penduduknya bekerja sebagai buruh bangunan di Medan dan tinggal di desa ini. Desa ini hasilnya tidak seberapa karena luas tanah yang dapat diusahakan sangat terbatas.

Penduduk yang mendiami daerah ini kebanyakan suku Jawa, suku Melayu dan ada juga suku Batak tetapi yang banyak adalah suku Jawa. Daerah ini tumbuh sebagai akibat peledakan penduduk yang mendiami daerah perkebunan, mereka membentuk suatu pemukiman baru. Desa Sungai Rotan ini berbatasan sebelah utara dengan desa Kolam, sebelah selatan dengan desa Sambirejo Timur, sebelah barat dengan perkebunan Bandar Khalifah dan sebelah timur dengan desa Bintang Meriah dan Bakaran Batu.

Desa ini tidak begitu besar dan menurut perhitungan luas arealnya adalah 516.085 Ha. Hanya 2/3 dari tanah daerah itu yang dijadikan ladang dan sawah. Sumber penghasilan dari pertanian tidak dapat diharapkan dan sebagian besar hanyalah untuk konsumsi penduduk itu saja. Walaupun demikian karena hubungan penduduk lebih dekat dengan kota Medan maka kehidupan penduduknya telah banyak mencontoh kehidupan kota. Oleh karena itu penduduk yang mendiami desa sungai Rotan tidak banyak perbedaannya dengan penduduk kota Medan. Pengaruh kehidupan pertanian di desa itu tidak banyak terhadap penduduk desa tersebut, karena sebahagian besar penduduknya adalah buruh atau karyawan.

Struktur pemerintahan di desa ini sebelum Pelita, dalam pengaturan desa hanya ada dua orang petugas, yaitu kepala Lorong mengurus dan mengatur sejumlah kelompok keluarga dan melaksanakan perintah dari kepala Desa (penghulu). Penghulu merupakan pemimpin desa yang bertanggungjawab kepada Camat, dan tugas-

nya belum begitu banyak ia tidak memerlukan pegawai atau pembantu dan kantor. Pekerjaannya hanya bersifat insidental saja misalnya dalam pencacahan jiwa atau sensus dan mengatur keamanan desa. Dalam melaksanakan pengamanan desa ia berhubungan dengan tokoh masyarakat untuk membantu kelancaran tugasnya.

Seorang penghulu atau kepala desa adalah orang yang dipercayai oleh masyarakat untuk memimpin mereka, dan tokoh yang seperti inilah yang dipilih oleh rakyat, termasuk desa Sungai Rotan. Itulah sebabnya partai politik berusaha untuk mempengaruhi agar setiap kepala desa memilih partai mereka.

Pada waktu sebelum Pelita kegiatan di desa Sungai Rotan dalam pembangunan belum nampak. Sarana pendidikan dan jalan yang ada hanya jalan biasa dan sekolah juga diusahakan oleh perkebunan. Peranan perkebunan terhadap Pembangunan desa tersebut memang besar dan desa tersebut juga dapat membantu perkebunan dlama mengisi kebutuhan tenaga pekerja.

Desa Tungkusan adalah satu desa yang terdapat di daerah Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini berbatas sebelah utara dengan Perkebunan PTP IX Tanjung Morawa dan sebelah selatan dengan desa Senembah, sebelah barat dengan dessa Tadukan Raga dan di sebelah Timur dengan desa Limau Mungkur. Desa ini diapit oleh dua buah sungai, yaitu sungai Belumai di barat dan di timur sungai Bahasa. Tanahnya terdiri dari dataran rendah di bawah bukit dan desa itu berada di tengah daerah yang berbukit seakan-akan merupakan bungkusan dan penduduk menyebut desa itu dengan nama Tungkusan. Karena daerahnya berbukit maka pada musim kemarau agak sulit air.

Pada masa penjajahan Belanda telah ada sebuah sekolah yaitu *Volkschool* sampai kelas tiga. Walaupun telah ada sekolah tetapi pendidikan didaerah ini tidak berkembang karena terisolasi dan dikelilingi oleh perkebunan. Sekarang bekas sekolah negeri tidak ada. Anak-anak yang akan bersekolah harus pergi ke desa yang berdekatan.

Pada mulanya luas desa ini 425 Ha, kemudian pada tahun 1953 di tambah oleh perkebunan sebanyak 360 Ha, sehingga luasnya menjadi 785 Ha. Karena daerah ini terisolasi perkembang-

an partai politik tidak berkembang, penduduk lebih suka memasuki organisasi keagamaan dan kemasyarakatan misalnya Serikat Tolong menolong, organisasi pengajian dan sebagainya. Penduduk sebagian besar tidak mengerti politik, mereka lebih banyak menaruh perhatian kepada masalah yang berhubungan dengan agama.

Luas tanah yang diusahakan sebanyak 16,5 Ha untuk persawahan, 26 Ha untuk ladang dan sisanya untuk pemukiman dan tidak diusahakan karena kurang subur. Hasil pertanian tidak mencukupi untuk kebutuhan penduduk desa yang terdiri dari 188 keluarga. Sebagian penduduk ada pula yang tidak mempunyai tanah garapan dan ada pula tanah di desa itu yang pemiliknya tinggal di kota dan tidak diusahakan karena tanah tersebut adalah tanah warisan.

Sebagian penduduk yang tidak memiliki tanah hidup sebagai penggalas atau pedagang sayur-sayur dan buah-buahan. Mereka membeli barang dagangan dari petani di desa tersebut dan pada pagi hari membawa ke kota Medan. Setelah itu mereka tidak bekerja dan menghabiskan waktunya di warung sampai waktu sore. Menjelang malam baru mereka mengumpulkan lagi sayur-sayur untuk dibawa pada pagi hari dan pekerjaan tersebut terus berlangsung tiap hari. Para petani yang bekerja di ladang atau sawah hanya bekerja sekedar meningkatkan kehidupan mereka boleh dikatakan tidak ada, sehingga waktu banyak hilang percuma.

BAB III

PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMRINTAHAN DESA

A. LANDASAN PELAKSANAAN

Pada tahun 1966 Pemerintah bersama-sama dengan DPR—GR menugaskan MPRS untuk meninjau kembali Undang-undang No. 18 tahun 1966 karena tidak sesuai dengan perjuangan Orde Baru untuk kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar, 1945 secara murni dan konsekuen. Penetapan itu tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Pelaksanaannya ditentukan pula oleh Tap MPR No. IV/MPR/1973 mengenai GBHN yang didalamnya tercantum pelaksanaan Otonomi Daerah.

Di dalam pelaksanaannya diuraikan bahwa pemberian Otonomi daerah bertujuan untuk menampung dan menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan otonomi itu diberikan merupakan suatu otonomi yang bertanggung jawab demi untuk meningkatkan kehidupan rakyat, melaksanakan pembangunan di daerah. Sebagai kelanjutannya maka lahir pula Undang-Undang No. 5 tahun 1975 tentang pokok Pemerintahan di daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka ada pedoman dalam pembangunan daerah pedesaan.

Di dalam pasal Undang-Undang itu dinyatakan bahwa Kepala Wilayah adalah sebagai wakil Pemerintah adalah penguasa Tunggal di daerah dalam arti memimpin daerahnya. Pengertian memimpin ialah mengkoordinasikan pembangunan dan melakukan pembinaan kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dalam pembinaan masyarakat segala bidang, termasuk juga kehidupan desa karena desa adalah salah satu daerah yang terkecil dalam satu propinsi. Pemerintah daerah wajib mengembangkan desa dari desa swadaya menuju desa swakarya dan kemudian dapat pula menuju desa Swasembada, sesuai dengan Undang-undang.

Untuk melaksanakan tugas pembangunan di daerah maka pemerintah Daerah mengeluarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 sebagai persiapan untuk melaksanakan TAP MPR No. IV/

MPR/1973. Putusan itu tujuannya adalah untuk menyusun suatu organisasi yang mantap dalam melaksanakan kegiatan di daerah terutama untuk melaksanakan Pembangunan.

Sebagai kelanjutannya maka dibentuklah BAPPEDASU (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara). Badan ini menyusun suatu perencanaan tahunan dalam melaksanakan Repelita di daerah, dapat melaksanakan kordinasi antara dinas yang berada di dalam lingkungan pemerintahan daerah. Dengan demikian pembangunan itu dapat terarah dan mencapai sasarannya.

Desa atau kampung di Sumatera Utara tidak banyak mengalami perubahan sesudah kemerdekaan. Perubahan yang terjadi di desa adalah penambahan penduduk, dan tidak terpelihara saluran irigasi dan jalan jalan, banyak yang rusak. Pendapatan penduduk desa makin berkurang jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pemerintah Sumatera Utara telah memikirkan untuk melakukan perbaikan sebab desa itu adalah tulang punggung ekonomi negara.

Setelah Orde Baru timbullah pemikiran untuk melaksanakan perbaikan desa di Sumatera Utara. Pembangunan desa di Sumatera Utara mempunyai dasar yang dalam untuk cepat dilaksanakan.

Pembangunan suatu desa adalah untuk mengubah dan membentuk suatu desa Swasembada. Di dalam pelaksanaan pengembangan desa, daerahnya dapat ditentukan seperti desa pertanian, nelayan, industri dan sebagainya sesuai dengan keadaan desa itu.

Untuk mencapai tingkat yang demikian bergantung kepada keadaan masyarakat itu,. Keadaan masyarakat atau desa sangat menentukan usaha yang dilakukan untuk pembangunan desa. Tiap desa mempunyai masalah sendiri dan setiap masalah harus dapat diketahui. Walaupun setiap desa mempunyai masalah tetapi secara umum dapat dihadapi.

Beberapa hambatan pembangunan desa di Sumatera Utara adalah:

1. Pertambahan penduduk yang demikian cepat terutama sekali di desa yang merupakan sumber urbanisasi.
2. Desa Sumatera Utara yang sumber penghidupannya dari pertanian dan penangkapan ikan yang dilakukan secara tradi-

- sional. Penduduk yang hidup demikian hampir 80% dari seluruh penduduk Sumatera Utara.
3. Banyak sekali desa pada masa sebelum Pelita yang terisolasi karena sulitnya hubungan. Jalan raya yang menghubungkan desa dengan kota Kabupaten atau Kecamatan tidak baik.
 4. Masyarakat statis dalam cara berfikir karena terikat kepada kebiasaan, adat-istiadat, seperti adat perkawinan, kematian dan lain-lain. Untuk kegiatan tersebut mereka dapat menghabiskan sebagian besar waktunya dan uangnya tanpa memikirkan kerugian. Mereka enggan menerima saran dari luar yang dianggapnya tidak dapat sesuai dengan tradisi yang mereka miliki.
 5. Keadaan alam yang sangat menguntungkan dan banyaknya sumber-sumber alam tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk pedesaan yang kurang ketrampilan dan ilmu pengetahuan. Demikian pula penduduk tidak dapat melakukan investasi bagi usaha-usaha yang dapat memberikan hasil.
 6. Penduduk desa mempunyai kecenderungan untuk membelanjakan uang yang diperoleh dari panen padi atau hasil lainnya kepada benda yang tidak begitu perlu. Mereka membeli radio, sepeda motor dan lain-lainnya untuk kepentingan prestise mereka dalam masyarakat desa itu.

Hambatan tersebut perlu harus dihilangkan penduduk desa mendapat pembinaan terus-menerus dan terpadu agar mereka dapat merobah kebiasaan mereka yang kurang baik. Desa perlu mendapat perubahan dalam pengelolaannya dan perlu adanya suatu perencanaan yang matang untuk hal tersebut. Dengan melihat kenyataan tersebut maka pemerintah Daerah Sumatera Utara berusaha agar seluruh desa dapat mencapai tingkat swasembada. Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusun suatu kebijaksanaan dasar bagi pembangunan desa di Sumatera Utara.

Kebijaksanaan Pembangunan Desa haru sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Didalam alinea ke-4 Undang-undang Dasar 1945 diuraikan bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumbuh darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pernyataan tersebut di atas jelas perbaikan desa di Indonesia

termasuk Sumatera Utara adalah sebahagian dari usaha untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Selanjutnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷⁾

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara juga dikemukakan tujuan pembangunan daerah pedesaan sebagai mana tergambar pada kaitipan tersebut dibawah ini :

Pembangunan Desa harus bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis, dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.⁸⁾

Pembangunan pedesaan di Sumatera Utara mempunyai landasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pembangunan desa di Sumatera Utara diarahkan untuk dapat mendukung pembangunan daerah. Jalur untuk mempercepat perkembangan desa dipergunakan lembaga yang tumbuh dalam masyarakat maupun yang dibina oleh pemerintah. Lembaga itu diharapkan untuk ikut mengembangkan masyarakat desa sehingga desa tidak lagi mengalami kehidupan terbelakang.

Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berencana melalui perencanaan yang matang dan terarah. Untuk itu maka pemerintah Sumatera Utara melakukan perencanaan melalui

7) Undang-Undang Dasar 1945, *Team Pembinaan Penatar Dan Bahan-Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia.*

8) *Pembangunan Desa, Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sumatera Utara 1980.*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di dalam badan ini duduk tokoh ahli yang menyusun perencanaan tersebut dan kemudian menjadi landasan bagi pembangunan termasuk pembangunan desa.

B. PELAKSANAANNYA

Pelaksanaan Pembangunan Desa di Sumatera Utara berdasarkan landasan yang telah disusun. Dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 pasal 80, pasal 81 C maka kepala daerah sebagai wakil pemerintah di bidang pemerintahan daerah adalah pelaksana dan korinator dalam membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan demikian ia sebagai kordinator atas segala kegiatan pembangunan di daerahnya, baik yang dilakukan oleh instansi yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal seperti dinas yang berada di daerahnya. Dalam kegiatan ini ia harus dapat melaksanakan segala kemampuan yang ada untuk mencapai suatu hasil yang besar. Dengan cara ini maka seorang kepala daerah dapat menggunakan segala potensi yang dimiliki daerah untuk menggerakkan pembangunan di daerahnya termasuk pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa potensi pemerintah dan masyarakat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Kanwil Departemen dan Dinas. Pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan sekolah, balai pengobatan umum, perbaikan jalan dan sebagainya.

Potensi masyarakat berupa gotong-royong, koperasi, kesenian, olah raga, pramuka, dan sebagainya. Dalam kegiatan itu pemerintah daerah harus dapat melakukan kordinasi dan pengembangan sehingga segala kegiatan dapat mengarah kepada peningkatan kehidupan masyarakat desa. Kepala daerah harus dapat menggunakan potensi masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan saling mengisi. Dalam melaksanakan pembangunan kepala desa dan organisasi desa harus mampu melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan di desa pembaharuan administrasi desa dan organisasi desa harus dirombak dan diperbaharui sesuai dengan tujuan pembangunan di desa. Sistem organisasi pemerintahan desa seperti dulu tidak dapat menampung lagi segala kegiatan yang dilakukan

di desa itu. Sarana pemerintahan desa haruslah ditambah dan diperbaiki. Untuk melaksanakan pembangunan di desa diperlukan suatu lembaga, seperti :

1. Lembaga pemerintahan desa.
2. Lembaga koperasi dan bank desa yang menyokong perekonomian desa.
3. Lembaga Serikat Tolongmenolong dan Lembaga Sosial Desa.
4. Lembaga olah raga seperti bola kaki, bulu Tangkis, volley dan jenis olah raga lainnya.
5. Lembaga pendidikan seperti badan penyantun pendidikan.
6. Lembaga kesenian dan kebudayaan daerah untuk membina dan memelihara serta mengembangkan.
7. Lembaga keagamaan seperti mesjid dan gereja.

Pada umumnya desa di Sumatera Utara belum seluruhnya memiliki lembaga yang demikian. Lembaga demikian baru ada sekitar 30—35% sebelum adanya Pelita dan pada desa tertentu malahan jumlahnya kurang.

Bertitik tolak dari keadaan tersebut maka pemerintah daerah Sumatera Utara melakukan perbaikan di desa. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka Pelita seluruhnya berada di bawah kekuasaan kepala daerah, sesuai dengan pasal 77 Undang-undang No. 5 tahun 1975.

Kepala daerah adalah Gubernur untuk tingkat propinsi, Bupati untuk tingkat Kabupaten, dan Camat untuk tingkat Kecamatan. Wilayah pembangunan yang terkecil adalah Kecamatan di mana Camat adalah kordinator, dan objek pembangunannya adalah desa.

Sejak Pelita II dibentuk wilayah pembangunan dari daerah pembangunan yang terkecil sampai yang terbesar. Pembentukan wilayah pembangunan itu juga bertujuan agar setiap daerah pembangunan mempunyai kesatuan dalam berbagai aspek seperti potensi alamnya, geografi, perekonomian, demografi dan sebagainya. Dengan adanya wilayah pembangunan itu maka terdapat pula jenjang dalam pelaksanaan pembangunan. Wilayah Republik Indonesia merupakan pembangunan utama, wilayah pembangunan besar, wilayah pembangunan sedang dan kecil.

Dengan adanya pembagian wilayah maka Pembangunan itu dapat berjalan sejak dari bawah sampai ke atas dan menunjang satu dengan lainnya. Desa dapat menunjang pembangunan kecamatan Kabupaten, Propinsi secara menyeluruh. Dalam Pembangunan tersebut tanggungjawab terletak pada instansi pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat seperti gotong royong dapat dipergunakan sebagai modal pembangunan. Antara pemerintah dengan masyarakat harus asaling mengisi untuk mensukseskan pembangunan.

Untuk melaksanakan Pembangunan yang dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya maka Kecamatan merupakan sasaran dari kegiatan pembangunan. Guna menunjang kegiatan tersebut maka dibentuklah suatu badan yang dapat melaksanakan kegiatan kerja di Kecamatan yang didukung oleh seluruh instansi baik vertikal maupun yang bersifat Dinas atau horizontal. Badan itu disebut dengan *Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)*.

Unit Daerah Kerja Pembangunan berada di kecamatan yang telah dipilih sebagai UDKP. Di dalam pelaksanaan telah disepakati pula oleh seluruh instansi proyek yang akan dilakukan dalam rangka pembangunan desa.

Kordinasi dari Kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan dipimpin oleh kepala daerah, tetapi proyek Unit Daerah Kerja Pembangunan bukan unit kerja Departemen Dalam Negeri. Tujuan dari Unit Kerja Daerah Pembangunan (UDKP) adalah untuk melaksanakan pemaduan seluruh unsur guna mempercepat proses pembangunan desa. Menjadikan desa swadaya menjadi swakarya dan seterusnya desa swasembada, secara bertahap. Dengan ini diharapkan agar desa di Sumatera Utara dapat menjadi desa swasembada dalam waktu 25 tahun mendatang sejak Pelita II.

Tiap kabupaten dalam rangka pembangunan desa di Sumatera Utara secara bertahap dilaksanakan Kecamatan UDKP. Dalam menetapkan suatu Kecamatan itu menjadi Kecamatan UDKP terlebih dahulu diadakan penelitian mengenai tata desa oleh petugas yang berwenang. Setelah selesai dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa tanggal 18 Pebruari 1974 Nomor DD.04./SK/PMDII/1974 maka hasil penelitian itu diteruskan kepada Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan melakukan klasifikasi desa yang terdapat pada kecamatan yang dijadikan sebagai Kecamatan UDKP. Dengan adanya klasifikasi maka diketahui keadaan pola desa termasuk desa swadaya, swakarya atau swasembada. Adanya klasifikasi itu dapat diketahui bantuan yang dapat diberikan kepada desa di Kecamatan tersebut. Sebagai hasil pelaksanaan UDKP, maka di desa setiap kecamatan terdapat prioritas yang dilakukan melalui musyawarah.

Pembangunan desa di Sumatera Utara lebih dahulu dilakukan memperbaiki keadaan pemerintahan desa yang belum baik. Segala urusan dilakukan oleh kepala desa atau kepala kampung yang status dan kedudukannya tidak jelas.

Sesudah Pelita sistem pemerintahan desa mulai diperbaiki agar dapat mendukung Pembangunan desa. Karena itu sejak lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa maka desa di Sumatera Utara mulai diperbaiki keadaan pemerintahannya. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka diadakanlah suatu reorganisasi pemerintahan di pedesaan. Desa mulai di tata kembali, ada yang dirombak dan dihapuskan sesuai dengan kebutuhan.

Perubahan yang penting dilakukan adalah menyusun pemerintahan desa dan perangkat desa agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan pembangunan. Untuk pelaksanaannya maka di setiap desa telah diinstruksikan oleh Gubernur Sumatera Utara agar membentuk susunan pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Dengan demikian maka pada setiap desa di Sumatera Utara dibentuk :

1. Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.
2. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan kepala sub-Wilayah.

Pelaksanaan perubahan tersebut berlangsung secara serentak karena ada desa yang telah mampu melaksanakannya ada pula yang harus secara bertahap dilakukan. Keadaan ini bergantung kepada kondisi dan keadaan wilayah desa itu. Seterusnya bentuk dan susunan kadang-kadang juga mengalami perubahan, misalnya struktur pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan memang terjadi beberapa hambatan seperti:

1. Kantor untuk pemerintah desa belum tersedia.
2. Kepala desa yang ada mempunyai latar pendidikan yang rendah sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembaharuan pemerintahan desa.
3. Pembiayaan yang diperlukan untuk merubah keadaan Desa sesuai dengan ketentuan Pemerintah sangat sedikit.
4. Keadaan masyarakat belum mampu untuk turut serta melakukan penanggulangan biaya perbaikan Desa karena keadaan ekonomi mereka masih lemah.

Hanya beberapa desa saja yang mampu mengatasi masalah tersebut sedang beberapa desa lainnya dalam usaha perbaikan.

Dengan adanya susunan baru dalam pemerintahan desa, maka roda pemerintahan desa mulai berjalan dengan lancar. Perencanaan pembangunan desa mulai dapat dilaksanakan dan masalah yang timbul di desa dapat pula diselesaikan. Pada Pelita pertama mulai kelihatan pembangunan prasarana produksi desa, perbaikan irigasi, jalan desa yang banyak dilakukan dengan swadaya masyarakat secara gotong-royong. Hal ini dilakukan karena pembiayaan desa belum ada dan walaupun ada hanya berupa bantuan desa yang dananya masih sangat kecil.

Walaupun secara menyeluruh belum kelihatan perubahan tetapi dengan adanya struktur baru dari pemerintahan desa telah mendapat sambutan dari masyarakat di Desa. Dengan bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa yang baru, terdapat suatu kordinasi dalam pembangunan desa.

Camat mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memajukan desa di wilayahnya, Kepala Desa setiap waktu harus menyusun perencanaan bagi pembangunan dan perbaikan di desanya. Dengan adanya Pelita maka Kepala Desa itu tidak menunggu laporan seperti dulu, tetapi harus mempunyai pandangan ke masadepan. Camat tidak hanya menunggu laporan dari Kepala Desa tetapi harus dapat mengkordinasikan pembangunan di wilayahnya. Dengan struktur pemerintahan desa yang baru, desa harus berkembang sesuai dengan kamajuan zaman.

C. HASIL YANG DIPEROLEH

Setelah Pelita I tampak beberapa perubahan di desa Sumatera Utara. Secara menyeluruh memang belum terlihat kemajuan karena keterbatasan dana pembangunan yang dilakukan secara bertahap.

Untuk mengetahui perkembangan dan hasil yang diperoleh sejak Pelita I akan diuraikan keadaan desa pada beberapa Kabupaten di Sumatera Utara. Beberapa desa yang diuraikan adalah desa di Kecamatan Balige Tapanuli Utara, desa di Kecamatan Siantar, Bandar di Kabupaten Simalungun dan desa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang.

Di Kecamatan Balige sejak Pelita I telah dilakukan kegiatan pembangunan, dan kegiatan tersebut kemudian ditingkatkan dengan membentuk Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Dengan adanya UDKP ini maka pembangunan di desa ini telah diadakan suatu kordinasi. Struktur organisasi desa telah disempurnakan sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Desa yang menjadi contoh di Kecamatan ini ialah Desa Balige III, Napitupulu Bagasan dan Lumban Pea. Pada desa ini memang telah dilakukan pembaharuan organisasi pemerintahan desa. Desa yang dahulunya berstatus sebagai kampung sekarang setelah diteliti keadaan penduduknya maka dijadikan sebagai desa dalam struktur baru.

Pembaharuan menyeluruh pada desa itu belum dapat dilaksanakan karena ketiadaan ruangan kantor dan perlengkapan yang diperlukan untuk kelancaran administrasi Desa. Kepala Desa di desa itu bekerja dengan peralatan yang ada demi untuk melaksanakan tugasnya. Pegawai yang membantu kepala Desa kebanyakan belum diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka membantu kepala desa atas kesadaran sendiri tanpa mendapat suatu imbalan, demi untuk perbaikan desa mereka.

Desa itu belum dapat mengembangkan inisiatipnya sendiri karena kurangnya sarana yang dapat menunjang untuk membangun desa. Sarana yang diperlukan seperti kantor dan pembiayaan kurang sekali. Kepala Desa kebanyakan hanya melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya oleh atasan seperti melaksana-

kan kegiatan gotong royong, memperbaiki saluran air, membantu petugas dalam Pelaksanaan intensifikasi pertanian dan sebagainya. Jadi pekerjaan Kepala Desa hanya menunggu tugas yang dibebankan kepadanya.

Walaupun demikian pada desa yang terdapat di Kecamatan Balige, yaitu Napitupulu Bagasan, Lumban Pea dan Balgie III banyak terdapat kemajuan. Dengan adanya instruksi dari Camat sebagai Kordinator UDKP maka prospek dan wajah desa mulai kelihatan lebih baik.

Adanya usaha peningkatan dan penyuluhan dari petugas yang turun ke desa dalam kegiatan pertanian dan peternakan maka kegairahan petani untuk mengolah tanahnya mulai kelihatan. Jalan yang menghubungkan Desa dengan kota Kecamatan telah banyak yang diperkeras dengan batu, karena adanya kerjasama masyarakat dengan pemerintahan desa setempat.

Pendidikan pada tiga desa ini tidak begitu mengalami kemajuan karena sejak adanya Pelita hanya terdapat penambahan sekolah Dasar di Desa Lumban Pea Sedang pada Desa yang lain belum ada. Kenyataan ini dapat di lihat dari tabel yang terdapat di bawah ini :

DAFTAR TENTANG PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN KEADAAN SEKOLAH DI DESA-DESA ⁹⁾

No.	D e s a	Penduduk	Pendidikan			Jmlh.	Bu- ta di SD Aks.	Masih Bl. di SD Sek	
			SD	SMP	SMA				
1.	Napitupulu Bagasan	2763 org.	871	716	345	1932	2	495	334
2.	Balige III	1548 org.	432	395	289	1116	2	251	179
3.	Lumban Pea	1681 org.	760	173	84	963	9	159	150

Keterangan : Di Lumban Pea 2 SD sebelum Pelita hanya satu.
Di Balige III SD tidak bertambah, tetap 4.
Di Napitupulu Bagasan tidak ada SD.

9) Keterangan dari Penilik Pendidikan Masyarakat Kecamatan Balige J. Simanjuntak.

Pelaksanaan Pelita bagi seluruh desa di Kecamatan Balige termasuk ketiga desa di atas dalam masa pembangunan ini terlihat adanya kemajuan. Hal ini dapat terlihat dari laporan yang dikemukakan oleh Unit Daerah Kerja Pembangunan Kecamatan Balige sebagai berikut :

DAFTAR JUMLAH DESA SWADAYA, SWAKARYA DAN DESA SWA SEMBADA DI KECAMATAN BALIGE SETIAP AKHIR TAHUN SELAMA PELITA II ¹⁰⁾.

akhir Tahun	Desa Jml.	Swasembada %	Desa Jml.	Swakarya %	Desa Swasembada		Keterangan
					Jml.	%	
1973/74	20	45,45	20	45,45	4	9,10	Jumlah Desa
1974/75	17	38,63	22	50	5	11,37	
1975/76	14	31,82	23	52,8	7	14,90	
1976/77	9	20,45	27	61,36	8	18,19	
1977/78	8	18,19	26	58,84	10	22,97	
1978/79	8	18,19	23	52,28	13	29,53	

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kemajuan desa di Kecamatan Balige secara bertahap. Keadaan ini terjadi karena adanya kordinasi pembangunan yang dilakukan oleh Camat.

Dalam kegiatan pembangunan desa lebih banyak Camat memegang peranan penting dari kepala Desa karena desa tidak mempunyai pembiayaan atau dana langsung yang dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa hanya pengumpulan tenaga penduduk untuk melaksanakan gotong royong. Kegiatan lain Kepala Desa ialah pemungutan uang IPEDA. Selama ini penduduk tidak pernah membayar pajak kecuali restribusi yang dikutip di pasar atau di batas daerah kecaamatan atas hasil bumi.

Di Kabupaten Simalungun kecamatan Siantar dan Kecamatan Bandar sejak Pelita I telah diadakan perubahan tata pemerintahan

10) Laporan Evaluasi Dan Monitoring Unit Daerah Kerja Pembangunan, Camat Balige 1980, hal. 6.

Desa. Kecamatan yang dahulu terdiri dari beberapa kampung dengan adanya perubahan, ada kampung yang disatukan menjadi satu desa. Penggabungan kampung diadakan untuk menjadikan pemerintahan desa dapat berjalan secara efisien.

Di Desa Tambun Nabolon Kecamatan Pematang Siantar struktur pemerintahan desa yang baru telah diajalkan tetapi tidak menyeluruh. Dalam melaksanakan pekerjaan administrasi desa, kepala Desa dibantu oleh Sekretaris tetapi kedudukannya juga masih merupakan pegawai honor. Kantor Kepala Desa masih berada pada satu ruangan di tempat kediaman kepala Desa.

Peralatan Kantor Desa sangat kurang, peranan kepala Desa sebagai pelaksana pembangunan di desanya belum kelihatan. Ia hanya sebagai pelaksana instruksi dari camat inisiatip yang dapat dilakukannya sangat sedikit.

Walaupun demikian ia sebagai kepala Desa dapat menghimpun masyarakat untuk melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan yang ada di Desa itu seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Serikat Tolong Menolong (STM) dan sebagainya. Karena itu kegiatan gotong royong dapat berjalan, dan desa kelihatannya mempunyai kegiatan.

Pelaksanaan pembangunan di desa tersebut kebanyakan datang dari Kecamatan dan kepala Desa hanya melaporkan kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pembangunan desa. Dengan adanya Pelita maka di desa itu, maka telah dibangun Sekolah Dasar yang dahulu belum ada. Jembatan dan jalan desa telah diperbaiki dengan melakukan pengerasan dan diberi batu.

Ladang penduduk yang dahulu kurang memberi penghasilan berkat adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian sekarang telah ditanami dengan cengkeh atau kopi. Di Desa Pematang Karasan dan Desa Kandangan yang terletak di wilayah Kecamatan Bandar dengan adanya Pelita telah banyak mengalami perubahan seperti kantor dan sebagainya dibangun.

Di Desa Kandangan kantor Desa telah dibangun dengan biaya bantuan Desa yang diterima dari Pemerintah dan atas gotong royong penduduk. Berbeda dengan Desa yang terdapat di Kecamatan Siantar yaitu Tambunan Nabolon Kepala Desa dapat mengambil inisiatip yang lebih banyak untuk membangun desanya. Kepala desa dapat menghimpun Dana dari para anggota desanya

untuk membangun Balai Desa dan mengatur jalannya pengairan bagi persawahan. Hal ini mungkin karena di daerah ini kehidupan penduduknya hanya semata-mata dari hasil pertanian, sehingga mudah menghimpun anggota masyarakat untuk gotong royong. Berbeda dengan Desa Tambunan Nabolon penduduk desa ini mempunyai lapangan pekerjaan yang berbeda-beda.

Dengan adanya swadaya masyarakat setempat dan kordinasi dari kepala desa, maka di Desa Krasaan dan Kandangan terjadi kenaikan hasil pertanian penduduk. Kenaikan hasil pertanian karena adanya bimbingan dan penyuluhan yang terus menerus dari penyuluh pertanian Kabupaten. Rata-rata penghasilan petani di daerah Kandangan dan Pamatang Kerasaan telah mencapai 10 ton gabah kering dalam satu tahun. Dahulu sebelum Pelita penghasilan penduduk tidak seperti itu.

Penduduk sekarang telah dapat memahami intensifikasi pertanian, di samping hasil sawah juga terdapat pula tambak ikan. Irigasi yang teratur dan adanya kerjasama di antara penduduk maka sawah-sawah juga dimanfaatkan untuk tempat pemeliharaan ikan. Adanya pusat pembibitan ikan darat di Kecamatan Bandar sangat menolong untuk perbaikan hidup para petani. Petani dapat mencontoh bagaimana pemeliharaan ikan di dalam tambak sehingga dapat menghasilkan ikan sebanyak mungkin.

Dalam bidang pendidikan dengan adanya Pelita, di desa Kandangan maupun di desa Pamatan Kerasaan telah dibangun SD Inpres. Sekolah yang diasuh oleh swasta juga mendapat bantuan berupa perbaikan gedung madrasah demikian pula perbaikan mesjid juga diadakan. Semuanya ini dapat berjalan dengan baik karena adanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dahulu disebut Lembaga Sosial Desa atau LSD.

Sejak adanya pembangunan di daerah ini kegiatan gotong royong makin digiatkan. Pada mulanya penduduk agak enggan untuk melaksanakan kegiatan itu tetapi setelah mereka melihat hasil yang tercapai maka setiap seminggu sekali dilakukan gotong royong. Tidak saja gotong royong dalam kerja tetapi juga gotong royong dalam mengumpulkan dana untuk memperbaiki tali air dan jalan desa serta kegiatan lain yang membutuhkan biaya. Jalan di desa ini telah baik dan dapat dilalui oleh kendaraan umum dan jalan yang menghubungkan desa dengan kota Kabupaten telah diaspal.

Adanya BKIA di desa ini sejak Pelita telah menambah kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan dan perlu melaksanakan keluarga berencana. Pertambahan penduduk yang dahulunya demikian cepat sekarang telah dapat dibatasi.

Hal ini dapat dilihat dari keadaan penduduk di kedua desa tersebut, berdasarkan perhitungan pada tahun 1980.

**KEADAAN PENDUDUK DI DESA KANDANGAN DAN DESA
PEMATANG KERASAN TAHUN 1980 ¹¹⁾**

Penduduk Desa Kandangan, 1980

Umur/ Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
0 - 4	324	350	674	Lahir 15 orang. Meninggal 6 orang.
5 - 14	694	618	1.312	
15 - 24	358	345	703	
25 - 54	479	465	944	
55 ke atas	297	315	612	
Jumlah	2.152	2.093	4.245	

Penduduk Desa Pematang Kerasaan, 1980

Umur/ Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
0 - 4	391	401	792	Lahir 112 orang Meninggal 72 orang
5 - 14	587	610	1.197	
15 - 24	419	485	954	
25 - 54	933	951	1.884	
55 ke atas	164	181	345	
Jumlah :	2.594	2.628	5.173	

11) Data-data dari *Bangdes TK, II Simalungun*.

Dari data-data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa angka kematian pada kedua desa itu kecil. Ini membuktikan bahwa kesehatan penduduk semakin baik karena sarana kesehatan telah ditingkatkan. Seterusnya pada desa Kandangan tampak kesadaran penduduk akan pentingnya keluarga berencana sehingga angka kelahiran dapat diperkecil. Ini semuanya karena adanya konsultasi tetap dari ibu-ibu dengan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang ada di desa itu. Produktivitas dapat diharapkan karena golongan yang berumur Dewasa pada kedua desa ini cukup banyak sedang angka ketergantungan, yaitu golongan dari umur 0 – 14 tahun jumlahnya kecil.

Di Kabupaten Deli dan Serdang, Desa di Kecamatan Percut Sungai Tuan Senembah Tanjung Muda Hilir sejak adanya Pelita perkembangannya agak lamban dibandingkan dengan desa kabupaten lainnya. Desa di Deli Serdang kemajuannya tidak serentak pengaruh lingkungan dan keadaan alamnya serta adat-istiadat besar pengaruhnya.

Dengan adanya instruksi Pemerintah untuk mengubah susunan pemerintahan desa sesuai dengan yang telah ditentukan mengalami hambatan. Di Desa Percut perubahan tata pemerintahan desa tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena keadaan peralatan dan personalia yang sangat terbatas. Pegawai yang bekerja belum mempunyai status pegawai negeri, mereka masih tenaga honor demikian pula kantornya telah tua dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan.

Kepala desa tidak mungkin melaksanakan inisiatif untuk melaksanakan swadaya masyarakat guna membangun desanya. Perubahan yang terjadi hanyalah pembangunan yang dilakukan oleh instansi yang bersifat vertikal misalnya dari Kecamatan dan dari Kabupaten seperti perbaikan jalan raya, sekolah dan perbaikan rumah ibadat seperti mesjid. Yang agak menunjukkan kemajuan hanyalah kehidupan nelayan.

Dewasa ini di Percut para nelayan telah membuat wadah Koperasi yang dapat melayani kebutuhan mereka, dan telah memperoleh KIK (Kredit Investasi Kecil). Dengan kredit ini nelayan telah dapat mempunyai motor boat penangkap ikan, untuk dapat melakukan penangkapan ikan ke tengah laut. Tetapi tidak semua nelayan menggunakan kesempatan ini karena kebanyakan mereka

tidak tertarik untuk meningkatkan pendapatannya. Mereka hanya mengumpulkan ikan sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Karena itu perlu suatu penelitian yang lebih mendalam terhadap kehidupan penduduk di desa pantai agar mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dengan mengetahui unsur penghambat maka kehidupan nelayan dapat ditingkatkan. Walaupun kemajuan mereka lambat! tetapi sekarang mereka telah lepas dari tengkulak yang selama ini mencekik kehidupan mereka.

Desa Sungai Rotan yang masih berada dalam lingkungan Kecamatan Percut Sungai Tuan dalam masa Pelita mengalami kemajuan. Struktur organisasi pemerintahan desa telah dapat berjalan, kepala Desa telah dapat menyusun anggota staf pemerintahan di desanya dengan bantuan sekretaris desa dan kepala lorong. Pegawai Desa masih tenaga honor, tetapi kepala desa dengan bantuan sekretaris desa telah dapat menghimpun potensi masyarakat untuk pembangunan desa.

Dengan adanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa maka seluruh masyarakat dapat digerakkan untuk melakukan kegiatan seperti :

1. Mengadakan gotong royong sesama anggota desa pada waktu tertentu untuk membersihkan parit, membuat jalan desa, memperbaiki mesjid dan langgar.
2. Melaksanakan Program Keluarga Berencana dan memberikan penjelasan kepada penduduk.
3. Meningkatkan pembinaan mental dan spiritual dengan melakukan latihan olah raga dan pengajian.
4. Membentuk lembaga kesenian dan pendidikan dengan bantuan lembaga pendidikan masyarakat misalnya pendidikan ketrampilan.

Dengan adanya pelaksanaan yang demikian maka kehidupan masyarakat di Desa Sungai Rotan ini lebih menunjukkan kemajuan. Kenyataan ini dapat terlihat dari keadaan mata pencaharian penduduk.

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK 12)

Tani	1.500 orang atau 29%
Karyawan Pemerintah dan ABRI	76 orang atau 1,5%
Pengusaha	71 Orang atau 1,4%
Buruh Tani	506 orang atau 10 %
Karyawan Swasta	87 orang atau 1,7%
Pensiunan	35 orang atau 0,7%
Lain-lain	2.794 orang atau 55,1%
Nelayan	----
Pengangguran	-----
Jumlah = 5.069 orang 100%	

Dari Laporan tersebut jelas bahwa pengangguran di desa ini tidak ada karena jumlah anak-anak adalah 2.337 orang, jadi sisanya 485 orang mempunyai pekerjaan tidak tetap. Dari keadaan ini dapatlah suatu gambaran bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam melakukan segala kegiatan perbaikan desa melalui swadaya masyarakat. Dengan adanya swadaya masyarakat itu maka segala lembaga desa dapat berjalan. Pendidikan telah dapat dikembangkan dan anak-anak umumnya mendapat pendidikan karena adanya sekolah dasar sebanyak tiga buah, dua buah dibangun sesudah adanya Pelita yaitu Sekolah Dasar Inpres. Sarana kesehatan seperti Poliklinik, Puskesmas dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) telah berdiri dengan perkembangan desa Sungai Rotan maka Desa Ini sekarang telah mencapai tingkat Swasembada.

Di Desa Tungkusan yang terletak di Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hilir sejak adanya Pelita mengalami perubahan atau pembaharuan dalam bidang pemerintahan desa sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dahulu dipimpin oleh seorang penghulu kampung, tetapi sekarang telah dibentuk suatu pemerintahan desa yang terdiri dari kepala Desa dengan sekretaris desa dan beberapa pegawai.

Walaupun kepala Desa telah mempunyai pembantu dalam mengurus desa tetapi karena kedudukannya dan juga pegawai desa masih merupakan tenaga sukarela, maka mereka lebih mengutamakan mencari nafkahnya sendiri. Letak desa yang terisolasi

12) Laporan Pembangunan *Desa Sungai Rotan*.

dengan perkebunan sekelilingnya tidak memungkinkan desa itu untuk berkembang dan juga tanahnya kurang subur. Hal ini menyebabkan penduduk desa tidak dapat diajak untuk membangun desanya. Keadaan desa ini jauh berbeda dengan desa yang lain.

Kemajuan yang telah dicapai pada masa Pelita ialah pembangunan sebuah gedung SD Inpres. Dengan bantuan uang dari Pemerintah telah diperbaiki rumah ibadah dan madrasah. Komunikasi desa dengan daerah luar telah lancar dengan melakukan pengerasan jalan ke desa. Hubungan desa dengan kota belum begitu lancar karena alat pengangkutan sangat kurang.

Walaupun kemajuan selama Pelita kurang pesat, tetapi dengan adanya Pelita anak sekolah yang dahulu harus bersekolah ke desa yang lain sekarang telah melanjutkan pendidikan di desa sendiri. Walaupun demikian minat anak untuk belajar masih kurang, karena penduduk setempat tidak menganggap bahwa pendidikan dapat meningkatkan kemajuan desa. Keadaan ini disebabkan karena kurangnya komunikasi penduduk di desa ini dengan dunia luar karena daerah mereka terisolasi. Keadaan ini menyebabkan desa ini masih merupakan desa Swadaya.

D. KEADAAN PEREKONOMIAN DI DESA

Desa di Sumatera Utara umumnya sebelum Pelita banyak yang terisolasi karena kurangnya sarana baik yang berupa sarana fisik maupun non fisik. Dengan adanya Pelita maka kehidupan perekonomian Desa mulai meningkat. Peningkatan kehidupan desa dimulai dengan adanya perbaikan jalan raya sehingga hasil pertanian dan hubungan antara daerah pedesaan dengan kota meningkat.

Sejak itu maka timbullah semangat kerja petani untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Adanya pembangunan wilayah Kecamatan melalui Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) memberikan dorongan bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya. Penyuluhan yang diberikan kepada petani di daerah pedesaan mempunyai arti penting karena mereka dapat menggunakan teknologi tepat guna di daerahnya. Hal inilah menyebabkan petani di desa kecamatan Balige, Kecamatan Bandar dan Kecamatan Percut Sungai Tuan meningkatkan penghasilannya.

Dalam bidang pertanian di desa itu juga telah ditingkatkan

hasil peternakan unggas dan ikan. Dengan meningkatnya hasil pertanian petani menghadapi kesukaran dalam pemasaran. Pengembangan koperasi untuk menampung hasil yang di produksi desa tidak lancar. Yang ada hanya koperasi untuk menyalurkan pupuk dan alat pertanian.

Bila hasil pertanian melimpah maka harga hasil pertanian itu rendah sekali, yang menyebabkan para petani enggan untuk melakukan menanam jenis tanaman yang sama. Tindakan petani tersebut menghambat kemajuan, dan petani itu kembali lagi melakukan sistem produksi seperti biasa.

Perekonomian desa secara umum kurang maju karena penduduk desa belum dapat memahami mengembangkan hasil pertanian mereka, di samping pendidikan yang kurang.

Di desa pantai Percut, nelayan enggan setiap hari turun ke laut karena setiap turun jaringnya rusak diganggu oleh ikan buntal yang tidak berguna. Mereka mengatakan memperbaiki jaring menghabiskan waktu yang lama sehingga lebih baik tidak ke laut. Cara berfikir yang demikian ini tentu saja membuat penduduk tidak mengalami kemajuan.

Penduduk yang mendiami daerah pertanian juga enggan untuk bekerja. Misalnya petani di desa Tungkusan tanahnya kurang baik bagi persawahan tetapi mereka tidak ingin mengalihkan usahanya dalam bidang peternakan atau menanam tanaman palawija. Ini disebabkan karena pemasaran tidak dikuasai oleh petani itu. Maka oleh sebab itu penyuluhan terhadap petani desa sangat penting untuk meningkatkan hasil daerah mereka di samping itu penduduk desa juga harus diberikan petunjuk untuk memasarkan hasilnya.

Kelambatan kemajuan perekonomian desa juga dipengaruhi oleh peranan dari petugas di desa seperti Kepala Desa. Dalam memajukan desa inisiatif kepala desa sangat menentukan. Desa Kandangan di Kabupaten Simalungun dan Sungai Rotan di Deli Serdang dapat menjadi Desa Swasembada karena kepala desanya mempunyai aktifitas dan inisiatif untuk mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan desa. Walaupun ada kegiatan pembangunan yang diatur oleh Camat, tetapi kebutuhan Desa yang mengetahui adalah Kepala Desa. Karena itu kecerdasan seorang Kepala desa serta latar belakang pendidikan diperlukan untuk membangun desa.

BAB IV PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

A. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka di Sumatera Utara Undang-undang itu juga telah dilaksanakan. Setiap desa telah melakukan perombakan struktur pemerintahan desa yang lama. Bentuk dan struktur pemerintahan desa yang dahulunya heterogen seperti di Tapanuli Huta, di Simalungun Kampung dan di Deli Serdang Kampung.

Setelah Pelita maka bentuk dan struktur pemerintahan telah uniform. Kalau dahulu kepala Desa atau Penghulu mengatur desanya dengan ketentuan adat yang telah turun temurun maka sekarang keadaan telah mengalami perubahan.

Kepala Desa sekarang benar-benar merupakan seorang pemimpin dalam wilayah desanya dan melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya melalui perundangan yang berlaku. Ia bertanggungjawab terhadap Camat dan mengelola desa sesuai dengan garis yang telah ditentukan, seperti kegiatan pembangunan desa, memperbaiki sarana produksi desa dan lain-lain.

Walaupun dalam perkembangan desa telah tersusun suatu struktur baru pemerintahan desa, tetapi dalam kenyataannya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada desa yang tidak dapat melaksanakan swadaya masyarakat karena keadaan daerah kurang subur dan tidak mempunyai sumber penghasilan, seperti desa Tungkuson di Seli Serdang.

Desa yang mempunyai kehidupan perekonomian baik seperti desa Kandungan Kabupaten Simalungun dan desa Sungai Rotan di Deli Serdang pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan. Dana yang ada dalam masyarakat telah dapat mencukupi kebutuhan desa tersebut. Dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan desa telah dilaksanakan struktur pemerintahan desa.

Kepala pemerintahan desa ialah Kepala Desa, dan kebijaksanaan berada di tangannya. Ia dibantu dalam pekerjaan sehari dalam urusan administrasi oleh Sekretaris Desa, yang mengkordi-

nasi segala masalah administrasi Desa. Pemungutan Ipeda dan menyusun statistik Desa serta keuangan dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan dibantu oleh pegawai Tata Usaha.

Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan Desa dewasa ini juga memimpin kegiatan seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Lembaga Musyawarah Desa adalah suatu lembaga yang merupakan tempat berkumpul segala unsur pemuka atau tokoh dalam masyarakat desa. Dalam lembaga ini juga dimusyawarahkan segala kebijaksanaan yang akan diambil oleh Kepala Desa dalam mengatur pemerintahan di desa.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah suatu potensi yang terdapat di desa seperti organisasi atau pramuka baik yang bersifat khusus maupun umum. Dengan adanya badan ini maka kepala Desa dapat menggunakan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat sebanyak mungkin demi kebaikan desa itu seperti mensukseskan pelaksanaan Keluarga Berencana, pelaksanaan gotong-royong.

Di desa Kecamatan Balige belum dapat dilaksanakan struktur pemerintahan desa yang baru karena sarana yang diharapkan belum dapat mendukung terlaksananya struktur pemerintahan desa sebagaimana mestinya. Banyak hal yang menghambat pelaksanaan struktur pemerintahan itu seperti keadaan masyarakat yang belum memahami perombakan struktur pemerintahan baru itu. Tingkat pendidikan kepala Desa belum sebagaimana yang diharapkan, dan perlu disempurnakan secara bertahap.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara sejak tahun 1981 mulai melakukan suatu kebijaksanaan menilai beberapa tingkat desa yang dapat dikembangkan menjadi desa Swasembada dan kemudian mengangkat Kepala Desa itu sebagai pegawai negeri, demikian pula pegawai desa yang lain. Beberapa desa sekarang ditingkatkan menjadi Kelurahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam Desa itu.

B CARA PEMILIHAN APARAT PEMERINTAHAN DESA

Pada masa sebelum Pelita kepala desa dipilih berdasarkan pemilihan dan biasanya yang dipilih adalah tokoh yang disegani oleh masyarakat dan memahami keadaan adat-istiadat. Setelah pe-

merintah Orde Baru pada beberapa desa ada yang diangkat tetapi ada juga yang terus menjadi kepala desa, sesuai dengan keadaan setempat.

Walaupun demikian peranan Camat sebagai kepala Wilayah yang membawahi desa juga menentukan dalam menetapkan kepala desa seorang Kepala Desa selain tokoh masyarakat desa ia juga harus memiliki pendidikan yang paling rendah, yaitu tamatan Sekolah Dasar. Bila hal ini tidak dipenuhi tidak jarang Camat langsung menjadi pejabat kepala desa di desa tersebut. Kenyataan ini dapat dilihat pada Desa Sungai Rotan sejak tahun 1976 – 1978 jabatan Kepala Desa dipegang langsung oleh Camat Wan Baharuddin.

Seorang Kepala Desa yang telah diangkat biasanya melakukan musyawarah dengan pemuka masyarakat di desanya untuk mengangkat pembantunya seperti kepala lorong. Para pembantu itu bekerja tanpa pamrih dari masyarakat. Yang dipilih sebagai pembantu kepala desa itu adalah mereka yang dianggap oleh masyarakat mampu dan mempunyai pengaruh seperti pengetua adat dan agama. Para petugas yang diangkat itu tidak mengharapkan imbalan dari jerih payahnya. Jabatan yang dibebankan di atas pundaknya berupa suatu pengabdian yang bersifat moral. Oleh karena itu maka jabatan Kepala Desa, Kepala Rukun Tetangga atau Lorong jarang diganti seperti petugas yang lain kecuali kalau yang bersangkutan meletakkan jabatan atau meninggal dunia.

Sejak dilaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 telah banyak kepala Desa yang telah diangkat sebagai negeri demikian pula Sekretaris dan telah ada pula beberapa desa yang telah ditingkatkan menjadi Kelurahan. Pelaksanaannya telah dilakukan secara bertahap sehingga dalam jangkauan waktu tertentu semua itu akan terlaksana. Dengan proses yang demikian itu maka sistem pemilihan dalam pengangkatan Kepala Desa tidak dilaksanakan lagi. Walaupun demikian setiap pengangkatan Kepala Desa itu lebih diutamakan penduduk yang berdiar di desa itu dan juga pemerintah mendapat saran dari tokoh setempat.

C. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH

Kepala Desa adalah petugas yang melaksanakan pemerintahan Desa dengan segala aparatur yang terdapat di desa. Ia melaksana-

kan tugas yang dibebankan oleh pemerintah kepadanya demi meningkatkan dan mengatur kehidupan desa. Di samping kedudukan petugas formal terdapat pula tokoh masyarakat yang turut bertanggungjawab di desa itu seperti pemuka agama, adat dan para cendekiawan.

Tokoh masyarakat desa ini sangat penting kedudukannya, karena mereka yang dekat berhubungan dengan masyarakat desa. Keadaan ini merupakan ciri yang turun menurun dalam kehidupan masyarakat desa. Dahulu sebelum penduduk mengenal sistem pemerintahan modern seperti sekarang ini mereka itu merupakan golongan yang terkemuka karena penduduk sering menanyakan segala sesuatu kepada mereka. Bukan saja penduduk malahan raja menghormati seorang dukun atau datu. Kedudukan mereka dalam masyarakat desa sampai sekarang ini masih dihormati karena pengaruh mereka cukup besar.

Di Tapanuli Utara seperti di desa kecamatan Balige setiap musyawarah senantiasa dihadiri oleh Raja Adat, pemuka agama (*Sintua*) maupun tokoh pemuda (*Naposo Bulung*). Di desa Kabupaten Simalungun seperti di Kecamatan Bandar dan Siantar selain pemuka adat, tokoh Ulama dari kalangan Islam dan Kristen juga turut serta pemuka suku yang mendiami desa tersebut. Hal ini dilakukan karena di desa Simalungun penduduknya tidak terdiri dari satu suku. Di desa kecamatan Deli Serdang keadaannya serupa dengan Kabupaten Simalungun. Dewasa ini musyawarah yang demikian di desa itu turut pula dihadiri oleh tokoh cendekiawan yang tinggal di desa tersebut.

Kegiatan tokoh masyarakat itu biasanya dilakukan di Balai Desa, di kantor kepala Desa atau di rumah Kepala Desa. Yang biasanya diperbincangkan dalam musyawarah itu adalah mengenai perbaikan tali air, gotong royong penyediaan dana desa dan lain-lain.

Setiap musyawarah diambil suatu keputusan tanpa melakukan pemungutan suara. Putusan itu merupakan suatu putusan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga desa itu. Di desa Kandangan Kecamatan Bandar hasil musyawarah penduduk harus memberikan sebagian hasil panen untuk kepentingan desa. Padi tersebut dipergunakan sebagai dana untuk petugas yang mengawasi pengairan air di sawah.

Dengan adanya pengawasan atas jalannya pengairan maka tali air tidak menjadi permasalahan lagi. Dahulu sebelum adanya petugas sering kali masalah pembagian air di sawah menjadi persoalan. Demikian pula dalam menyediakan dana untuk pengerasan jalan desa dan sebagainya. Bagi desa yang keadaan ekonominya lemah pungutan itu tidak dapat dilakukan.

Walaupun demikian di desa Tungkusan di Kecamatan Tanjung Muda Hilir Kabupaten Deli Serdang peranan tokoh masyarakat tetap ada. Mereka oleh kepala desa tetap diajak berunding dalam melaksanakan/instruksi dari Camat. Dengan adanya keikut-sertaan tokoh masyarakat maka secara berangsur program pemerintah seperti Keluarga Berencana dapat berjalan. Melalui pimpinan masyarakat mudah diberikan penerangan Keluarga Berencana, karena banyak anggota masyarakat yang merasa bahwa program itu bertentangan dengan norma agama.

Di dalam bidang pertanian juga tokoh masyarakat banyak memberikan sumbangan bagi keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Dengan bantuan mereka Kepala Desa dapat menghimpun untuk bergotong royong, mengatur sistem pengairan desa dan pekerjaan lainnya. Dalam pemerintahan desa mereka itu merupakan penasihat yang penting bagi Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan.

Di dalam tokoh masyarakat termasuk juga cerdik cendekiawan, yaitu orang yang telah mempunyai pendidikan dan keahlian tertentu. Di dalam masa pembangunan beberapa desa memanfaatkan tenaga mereka ini untuk tujuan tersebut.

Di Desa Kandangan Kabupaten Simalungun ahli pertukangan seperti Tukang besi dan Tukang kayu selain turut membantu pembangunan desa seperti mesjid, balai desa dan lain-lain, juga turut melatih tenaga yang putus sekolah. Anak yang tidak dapat meneruskan sekolah dilatih membetulkan mesin, bertukang dan turut dalam praktek kerja di desa. Ini dikerjakan tanpa mengeluarkan biaya dan atas swadaya masyarakat. Karena adanya inisiatif melatih pemuda yang putus sekolah itu menyebabkan di desa Kandangan tidak terdapt pengangguran. Selain dari itu setiap pekerjaan atau bangunan yang dikerjakan jarang mengeluarkan biaya karena dikerjakan dengan gotong royong oleh masyarakat.

Bagi cendekiawan yang tidak mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu, mereka juga dimanfaatkan tenaganya di desa.

Seorang guru yang mengerti pendidikan diberikan tugas untuk membentuk pramuka dan melakukan kegiatan seperti kesenian. Tenaga ahli dalam bidang kesehatan seperti manteri kesehatan dan bidan diminta tenaganya untuk membantu kesehatan penduduk di desa dan pelaksanaan keluarga berencana. Seluruh tenaga cerdik pandai di desa dimanfaatkan untuk kepentingan desa.

Karena kegiatan tersebut maka desa Kandungan di Simalungun berhasil menjadi juara dan desa teladan beberapa kali dan desa tersebut dinilai merupakan desa yang berhasil. Keberhasilan itu menyebabkan kedudukannya meningkat menjadi Desa Swasembada, suatu desa yang menjadi harapan dalam pembangunan.

Keadaan yang sama dalam mengatur masyarakat pedesaan juga dilakukan oleh desa di Kecamatan Balige seperti Desa Lumban Pea, Napitu Pulu Bagasan dan Balige III, walaupun keadaan keuangan tidak menggembirakan. Di Desa Tungkusan Kecamatan Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang keadaan jauh tertinggal karena di desa itu tidak terdapat kaum cerdik pandai.

Desa yang terisolasi dan tidak mempunyai lingkungan yang baik tidak menarik bagi orang yang mempunyai keahlian untuk menetap di desa itu. Kepala Desa tidak dapat melakukan pembangunan desanya sebagaimana desa yang lain. Kemajuan yang diharapkan sulit dicapai, penduduk yang ingin maju harus meninggalkan desa itu dan pindah ke tempat lain atau ke kota Medan.

Desa yang lebih berhasil memanfaatkan cerdik cendekiawan di Deli Serdang ialah Desa Sungai Rotan. Di desa ini keadaan jalan telah baik dan hubungan yang sangat dekat dengan kota Medan menyebabkan banyak orang berpendidikan yang tetap tinggal di desa ini. Kepala Desa dapat memanfaatkan tenaga dan fikiran mereka, untuk membina desa itu. Dengan bantuan buah fikiran mereka maka desa itu menjadi lebih sempurna. Dari satu daerah yang dahulunya merupakan bagian dari suatu desa maka sekarang telah berkembang menjadi suatu desa Swasembada. Di desa ini inisiatif Kepala Desa Nyonya Sanimah Arifin menonjol sekali, karena ia mempunyai latar belakang pendidikan yang memungkinkan ia dapat melaksanakan perubahan dalam masyarakat.

D. ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK

Di desa perhatian penduduk mengenai masalah politik kurang karena penduduk desa tidak mengerti politik karena pendidikan

mereka kurang dan keadaan ekonomi tidak memuaskan. Bagi mereka kehidupan yang lebih layak adalah tujuan utama. Pada masa Orde Lama sering tokoh politik dalam mengembangkan organisasi mereka memberikan harapan sehingga di desa juga terbentuk organisasi politik. Apa arti dan tujuan yang sebenarnya dari partai politik, umumnya rakyat tidak mengetahui.

Setelah lahirnya Orde Baru kehidupan partai politik di desa tidak berkembang. Apa lagi mereka telah mengalami keadaan yang tidak menyenangkan pada masa Orde Lama, sekarang organisasi yang ada di desa kebanyakan bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan serta Olah Raga. Organisasi seperti ini memang diperlukan oleh masyarakat Desa karena dengan adanya wadah ini kegiatan desa yang bersifat kegotong royongan dapat digerakkan.

Bertolak dari keadaan dan pemikiran yang ada dalam masyarakat, maka pada beberapa Desa telah tumbuh organisasi yang bersifat non politik. Dalam lembaga pemerintahan desa wadah untuk itu memang telah tersedia dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Dalam lembaga ini kegiatan organisasi dapat ditampung segala kegiatannya dan mendapat dukungan dari seluruh penduduk Desa. Organisasi ini bagi desa sangat penting untuk mengembangkan kreativitas masyarakat desa sehingga dinamika desa dapat berkembang.

Karena itu Lembaga yang merupakan suatu wadah dari organisasi masyarakat Desa merupakan pula suatu unsur ketahanan seluruh kehidupan masyarakat desa baik ditinjau dari segi fisik maupun non fisik. Dari segi fisik eksistensi dari organisasi itu dapat pula dihimpun menjadi suatu kekuatan bagi desa untuk mengembangkan pembangunan. Anggota organisasi dapat diajak melaksanakan gotong royong untuk membangun desa, membangun persawahan, memberantas hama tanaman, membangun jalan desa dan sebagainya. Segi Non Fisik adanya organisasi itu dapat pula membantu Kepala Desa untuk meningkatkan cara berfikir penduduk desa, membentuk kerukunan diantara penduduk desa misalnya dengan adanya Serikat Tolong Menolong dan Koperasi Desa untuk meningkatkan kehidupan desa.

Keadaan desa yang telah mempunyai organisasi yang bersifat Non Politik itu jelas kelihatan kemajuannya. Adanya suatu organisasi Pramuka mendidik anak desa untuk mencintai Tanah Air,

Bangsa, lingkungan hidup dan dapat pula dididik menjadi trampil dan disiplin dengan latihan yang dilakukan di balai desa. Anak desa pun banyak yang sudah merasa tidak berbeda dengan anak kota karena pertemuan yang sering diadakan di antara kelompok pramuka.

Serikat Tolong Menolong (STM) yang terdapat di Desa memberikan suatu kesadaran penduduk untuk hidup bergotong royong. Di Desa Kandangan setiap peristiwa kemalangan maupun pesta perkawinan Serikat Tolong Menolong turut memberikan bantuan baik moral maupun meterial. Mereka bersama mendirikan teratak, membantu orang yang ditimpa musibah dengan uang maupun tenaga. Dalam kegiatan ini mereka tidak membedakan suku maupun agama. Toleransi hidup di desa telah kelihatan berkembang.

Kalau di suatu Desa penduduknya terdiri dari umat Islam maka terdapat pula suatu kegiatan pengajian. Dalam kegiatan itu kepada penduduk desa ditanamkan ajaran agama yang dapat menjadi petunjuk bagi mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selain dari itu juga di kalangan kaum ibu diajarkan pula pendidikan kesejahteraan wanita, seperti menjahit dan pemeliharaan anak serta makanan yang sehat melalui organisasi Dharma Wanita di desa.

Tentu saja dalam kegiatan organisasi itu sering mereka menggunakan tenaga ahli dan kalau hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh anggota dari desa itu mereka mendatangkan dari tempat lain. Segala pembiayaan dalam kegiatan organisasi itu ditanggulangi oleh organisasi itu tetapi juga dana desa digunakan sebagai tambahan. Pada beberapa desa telah dilakukan suatu iuran bagi penduduknya setiap hasil panen. Dana itu diperoleh dalam bentuk bahan mentah dan dipergunakan bila keadaan memerlukan, salah satu diantaranya adalah untuk kegiatan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Di Tapanuli Utara seperti Kecamatan Balige kegiatan organisasi non politik juga berkembang. Penduduk Kecamatan Balige seperti desa Lumbang Pea, Napitupulu Bagasan dan Balige III organisasi yang menonjol di desa adalah organisasi marga yang bersifat adat dan organisasi agama seperti *Naposo Bulung* (organisasi pemuda pemudi).

Dengan organisasi yang bersifat keagamaan ini kegiatan sosial seperti Kelangan, Pendidikan, Kesenian dapat pula dilaksanakan di desa itu. Sejak dahulu di Tapanuli Utara sarana pendidikan dan kesehatan berkembang melalui organisasi Gereja. Dewasa ini melalui LKMD yang terdapat di desa dapat lebih aktif memainkan peranan dalam melaksanakan kegiatan organisasi tersebut. Organisasi Naposo Bulung mengadakan aktifitas dalam kegiatan kesenian dan olah raga. Kegiatan gotong-royong sering juga dilaksanakan melalui organisasi yang bersifat adat seperti marga. Ikatan keluarga yang erat di Tapanuli tu merupakan potensi yang baik dalam menunjang kegiatan pembangunan di daerah tersebut.

Pada umumnya di desa kegiatan organisasi yang bersifat politik tidak mendapat tempat karena kebutuhan rakyat di pedesaan adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk tujuan inilah maka tumbuh organisasi yang bersifat non politik di desa. Secara umum dapat dilihat di desa tumbuh organisasi yang bersifat non politik seperti :

1. Pramuka.
2. Organisasi yang bersifat keagamaan (Islam) Wirid Yasin, Serikat Tolong Menolong (STM), Paduan Suara Mesjid.
3. Organisasi yang bersifat Kristen kelompok Vokal, Naposo Bulung, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
4. Organisasi kepemudaan seperti AMPI.
5. Organisasi kesenian seperti pencak silat, ketoprak, wayang dan lain-lain.

Salah satu organisasi yang bersifat non politik, yaitu Koperasi yang umumnya kurang berkembang. Hal ini mungkin karena pengalaman penduduk masa lampau, di mana sarana koperasi tidak mencapai tujuan, dan kesadaran berkoperasi belum ada. Yang ada koperasi hanya di desa Percut berupa koperasi perikanan yang telah berhasil meningkatkan kehidupan nelayan di desa itu. Walaupun demikian koperasi itu baru dalam taraf pemberian kredit saja sedang peningkatan dalam menampung hasil laut belum juga kelihatan.

BAB V PENUTUP

A. RANGKUMAN ISI

Bab I merupakan pendahuluan yang menggambarkan pokok permasalahan. Di Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru telah dilaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang yang dituangkan dalam PELITA. Pelita sampai sekarang telah dilaksanakan tahap demi tahap sehingga sekarang telah berada pada periode Pelita III. Perubahan yang terjadi pada masyarakat akan melahirkan masalah dan untuk mengetahui masalah itu perkembangan Pelita diuraikan secara historis tahun 1969.

Seluruh permasalahan tentu tidak dapat terjangkau dalam penulisan karena bidangnya sangat luas dan mempunyai corak yang berbeda. Dalam penulisan ini fokus penelitian diarahkan ke daerah pedesaan. Pedesaan adalah suatu wilayah yang terkecil dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan selama ini mempunyai tingkat kehidupan sosial yang rendah.

Dalam penelitian daerah pedesaan penulisan lebih menitikberatkan kepada masalah struktur pemerintahan. Keadaan struktur pemerintahan besar pengaruhnya bagi keberhasilan dalam perubahan karena struktur yang baik akan mudah mengorganisasi suatu pelaksanaan pekerjaan. Dalam masa Pelita di daerah Pedesaan Sumatera Utara penulis mencoba menjelaskan dan mengungkapkan seberapa jauh pengaruh Pelita telah mengubah struktur pemerintahan di desa Sumatera Utara. Sebagai sampel diambil tugas desa dari tiga Kabupaten yang berbeda, yaitu desa di Kabupaten Tapanuli Utara, Simalungun dan Deli Serdang.

Pada ketiga Kabupaten itu terdapat suatu permasalahan yang berbeda ditinjau dari segi geografis, ekonomis dan demografis. Dengan mengetahui keadaan ketiga daerah pedesaan itu maka dapat diambil suatu gambaran umum mengenai seluruh desa di Sumatera Utara.

Pada Bab II diuraikan keadaan desa sebelum adanya Pelita. Pada masa sebelum Pelita keadaan desa menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat yang masih belum mencapai suatu kemajuan karena pengaruh pemikiran yang tradisional dan sarana yang

tidak dapat mendukung kemajuan desa itu. Selain itu perhatian pemerintah Orde Lama lebih menitik beratkan kepada masalah politik juga merupakan suatu gambaran dari corak dan kehidupan masa itu.

Struktur pemerintahan di daerah pedesaan tidak mengalami perubahan walaupun kemerdekaan telah lama. Keadaan pemerintahan di desa belum mengalami kemajuan. Di desa tumbuh organisasi politik walaupun penduduk desa tidak memahami masalah politik tetapi rakyat di desa dijadikan alat untuk kepentingan politik. Desa tidak mengalami perubahan pada umumnya terutama dalam bidang perekonomian. Jalan desa dan pengairan banyak yang rusak dan tidak mendapat perhatian. Pendidikan juga belum berkembang hanya atas swadaya masyarakat pada beberapa desa berdiri sekolah dasar.

Keadaan ekonomi yang tidak baik kehidupan sosial dan budaya daerah pedesaan tidak berkembang. Penduduk desa yang ingin mengubah kehidupan pindah ke kota di sekitarnya sehingga terjadi urbanisasi. Organisasi sosial yang ada hanyalah organisasi yang bersifat keagamaan, baik berupa organisasi yang bernaung dalam lingkungan Gereja maupun yang bernaung dalam organisasi Islam.

Pada Bab III berisi uraian tentang pelaksanaan Pelita di daerah pedesaan Sumatera Utara terutama dalam merombakan struktur pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979. Dijelaskan apa yang menjadi landasan pemikiran dari Pemerintahan Orde Baru melaksanakan Pelita dan merombakan struktur masyarakat pedesaan.

Selanjutnya juga diuraikan bagaimana pelaksanaan dari perubahan struktur pemerintahan pedesaan itu pada desa yang dijadikan sampel. Dalam melaksanakan perombakan struktur desa terjadi beberapa hambatan yang disebabkan karena keadaan daerah dan situasi yang tidak memungkinkan terjadinya perubahan secara menyeluruh. Pada kenyataan jelas bahwa pelaksanaan perubahan struktur pemerintahan itu harus dilakukan secara bertahap karena masalah pembiayaan dan dana sangat penting. Pelaksanaan Pelita di desa belum sebagaimana yang diharapkan. Walaupun demikian pada beberapa desa di mana kepala desanya mempunyai inisiatif untuk menghimpun swadaya masyarakat

maka di desa itu dapat berhasil dilaksanakan beberapa pembangunan.

Dengan adanya perubahan struktur pemerintahan di desa walaupun tidak banyak tetapi mempunyai arti bagi perubahan kehidupan perekonomian desa. Dewasa ini penduduk desa telah memproduksi hasil untuk kebutuhan pasar seperti ikan, kopi, cengkeh dan berusaha mempertinggi produksi palawija karena jalan yang menghubungkan desa dengan kota sebagai tempat penampungan telah baik.

Pada Bab IV diuraikan pengaruh Pelita itu dalam gambaran secara menyeluruh pada desa yang menjadi sampel. Pada uraian ini dapat terlihat bagaimana besarnya pengaruh yang lahir di desa itu setelah adanya Pelita. Ada suatu desa yang besar perubahan yang dialaminya karena Pelita, sedangkan ada desa yang sedikit perubahan. Hal ini ditunjang oleh faktor yang ada di desa itu baik faktor material maupun non material.

Bab Kesimpulan, berisi penjelasan umum dari hasil yang telah diteliti. Penjelasan yang dimaksud baik merupakan suatu hasil dari penilaian penulis maupun hasil dari analisa. Dengan adanya pandangan penulis maka bagi tim lahir suatu asumsi apa yang harus dilakukan dalam pembangunan di desa Sumatera Utara untuk masa depan sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan mempunyai daya guna.

B. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dikemukakan adalah suatu hasil dari penelitian yang diperoleh dan merupakan suatu tanggapan yang dilihat dari desa yang telah diteliti. :

1. Keadaan geografi, adat istiadat dan pengaruh lalu lintas menyebabkan lahir perbedaan antara desa di Sumatera Utara. Desa yang mempunyai hubungan lalu lintas baik dan adat istiadat yang mendukung pembangunan menyebabkan desa itu dapat berkembang menjadi Desa Swasembada. Tetapi kalau keadaan yang sebaliknya seperti pada Desa Tungkusan di Deli Serdang keadaannya masih tetap tidak mengalami perubahan.
2. Sarana lalu lintas mempunyai peranan yang penting sekali sebagai penunjang bagi perkembangan desa karena dengan adanya jalan raya maka tidak saja perkembangan perekonomian desa dapat ditingkatkan tetapi juga penduduk desa

dapat mengalami kemajuan seperti penduduk kota. Dengan demikian pembangunan dapat serentak dilaksanakan baik di kota maupun di desa dalam waktu yang sama.

3. Dengan adanya pembangunan di daerah pedesaan secara terus menerus dan bertahap memberikan suatu rangsangan bagi penduduk pedesaan untuk melaksanakan peningkatan kehidupan mereka itu. Salah satu di antaranya meningkatkan kemajuan pendidikan. Di desa Kandangan Kabupaten Simalungun, Sungai Rotan di Deli Serdang kegairahan penduduk untuk menyekolahkan anaknya sangat besar setelah mereka merasakan kemajuan di desa mereka itu.

Kenyataan ini dapat terlihat bahwa sebelum adanya pembangunan di desa ini perkembangan pendidikan kurang dan anak yang ingin bersekolah harus pergi ke kota kecamatan. Tetapi setelah adanya peningkatan kehidupan di desa itu tidak saja atas usaha pemerintah terjadi kemajuan pendidikan tetapi juga pihak swasta juga mendirikan sekolah. Di desa itu lahir keinginan penduduk untuk mengejar segala ketinggalan.

4. Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa seperti Pramuka, Kesenian, Kegotong-royongan, Koperasi, Keluarga Berencana dapat mencapai sasarannya bila struktur organisasi desa sebagaimana yang telah digariskan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan semestinya. Dalam masalah ini pada beberapa desa dapat berjalan karena banyak kepala desa yang tidak mempunyai inisiatip sehingga potensi yang ada di desa itu tidak dapat digunakan. Tidak adanya inisiatip ini disebabkan karena latar pendidikan dan juga karena mereka menganggap pekerjaan sebagai kepala Desa itu hanya sebagai sambilan saja. Hal ini juga disebabkan karena masih banyak kepala desa yang belum menjadi pegawai negeri sehingga tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa sangat kurang.
5. Sistem musyawarah dengan mengikutsertakan seluruh tokoh dalam lingkungan masyarakat desa merupakan suatu cara yang sangat baik dalam pengembangan desa. Di Desa Kandangan dan Sungai Rotan pemerintah desa dapat menggunakan seluruh potensi desa untuk memperbaiki Desa malahan membangun desa itu. (Swadaya masyarakat dapat dihimpun

menjadi suatu kekuatan dalam memperbaiki kehidupan desa sehingga penduduk di desa ini tidak begitu meletakkan seluruh pembiayaan desa itu dari adanya bantuan pemerintah.

6. Perkembangan struktur pemerintahan desa sangat penting dilaksanakan karena belum berlangsung secara menyeluruh di daerah Sumatera Utara sehingga ini juga merupakan suatu faktor yang melahirkan lambatnya pembangunan desa. Untuk mencapai sukses dan tercapai suatu desa yang ideal maka perlu dana desa ditambah. Penambahan dana dapat diperoleh baik melalui sumber yang diperoleh dari daerah pedesaan seperti IPEDA maupun hasil lainnya.
7. Seterusnya pengembangan sarana yang mengembangkan perekonomian di desa seperti perluasan Puskesmas, Balai Kesehatan, Balai Penelitian Pertanian serta penyuluh pertanian harus terus ditingkatkan karena dengan adanya sarana ini penduduk desa mempunyai semangat dalam meningkatkan kesejahteraan. Penduduk desa dapat melakukan suatu perombakan kehidupan mereka kalau ada yang dilihatnya. Di Kecamatan Badar misalnya penduduk mulai bersemangat melakukan pemeliharaan ikan tambak setelah melihat hasil ikan tambak yang terdapat pada Balai Benih Perikanan Darat yang ada di Kecamatan itu. Dewasa ini penduduk sekitar Kecamatan Bandar mempunyai pendapatan yang meningkat dan salah satu peningkatan itu adalah dari hasil perikanan darat yang dipelihara di sawah.
8. Keadaan masyarakat desa yang terorganisasi melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dimana seluruh potensi dari setiap kelompok masyarakat yang ada di desa itu dapat disatukan dan merupakan suatu modal pembangunan desa. Keadaan ini harus terus dipertahankan dan dikembangkan, karena setiap desa yang telah membentuk LKMD itu dapat melakukan suatu musyawarah dengan setiap kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.

Dengan adanya LKMD itu maka organisasi yang bersifat politik seperti pada zaman Orde Lama tidak diperlukan, karena penduduk desa telah mempunyai mudah untuk melakukan segala kegiatannya.

C. H A R A P A N

Dari uraian dan penjelasan di atas maka dapatlah diketahui bagaimana pelaksanaan Pelita di desa Sumatera Utara pada umumnya. Hasil tulisan dan penguraian dapat dijadikan petunjuk bagaimana keadaan pembangunan di desa Sumatera Utara. Tidak seluruh desa sama dalam melaksanakan Pelita di daerahnya. Keadaan ini disebabkan karena banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan Pelita. Faktor yang bersifat non material seperti keadaan geografis, demografis dan sosiologis banyak menentukan keberhasilan pembangunan di desa itu. Walaupun demikian hasil penulisan ini dapat kiranya merupakan suatu gambaran dari hasil Pelita di Daerah Pedesaan Sumatera Utara.

Gambaran tersebut diperoleh dari hasil penelitian pada beberapa desa di tiga Kabupaten di Sumatera Utara, melalui wawancara langsung di desa tersebut. Permasalahan yang terdapat di desa itu memang telah dapat ditemui tetapi kalau kita melihat keadaan Sumatera Utara yang agak berbeda dengan daerah lainnya disebabkan heterogenitas suku yang mendiami daerah pedesaan maka hasil penelitian yang dilakukan itu belumlah begitu sempurna.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk mengetahui secara lebih mendalam perlu diadakan suatu penelitian yang telah diadakan jelas pula suatu tipe desa yang sempurna sebagai harapan dalam Pelita belum terdapat di Sumatera Utara, karena beberapa faktor. Untuk mencapai suatu desa yang diharapkan perlu dana untuk pembangunan desa ditingkatkan demikian pula struktur pemerintahan desa harus dikembangkan dan wewenang Kepala Desa dalam pembangunan harus jelas.

Dengan wewenang yang demikian maka Kepala Desa dapat menghimpun warganya untuk meningkatkan pembangunan desa yang merupakan bahagian yang penting dari Negara Republik Indonesia.

DAFTAR SUMBER

1. Bayu Suryadiningrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia*, Dewaruci, press, Jakarta 1981.
2. Biro Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, *Penduduk Tapanuli Utara, 1980*.
3. Bahan-Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara*.
4. Camat Balige, *Laporan Evaluasi dan Monitoring Unit Daerah Kerja Pembangunan Balige, 1980*.
5. C.V. Usaha Nasional, *Pemerintahan Desa* (U.U. R.I. No. 5 tahun 1979).
6. Desa Kandangan, *Daftar Isian Penelitian Tata Desa, 1981*.
7. Desa Pematang Kerasaan, *Penelitian Tata Desa, 1980*.
8. Desa Tambun Nabolon, *Penelitian Tata Desa, 1981*.
9. Desa Sungai Rotan, *Laporan Pembangunan, 1980/1981*.
10. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Sumatera Utara, *Pembangunan Desa, 1980*.
11. Kantor Statistik, *Laporan Kegiatan Kantor Statistik Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Dinas, 1980/1981*.
12. Iskandar Alisyahbana, *Teknologi dan Perkembangan*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1980.
13. Kuntjarningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1971.
14. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Utara*, Djakarta 1953.
15. Lipton & More, *Metodologi Studi Pedesaan di Negara Berkembang*, Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta 1980.
16. Pemda Sumatera Utara (BAPPEDASU), *Rencana Pembangunan Tiga Tahun Desa Pantai Sumatera Utara, 1975/1978*.
17. Pemda Sumatera Utara, *Almanak Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, 1979*.
18. ———, *Sumatera Utara Membangun*, Medan 1976.

19. R. Suparno, *Mengenal Desa*, Intermasa, Jakarta 1977.
20. Sartono Kartodihardjo, *Masyarakat Kuno & Kelompok-Kelompok Sosial*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977.
21. The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, 1968.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Abdul Majid
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat : Desa Percut

2. Nama : Nyonya Sanimah Arifin
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa
Pendidikan : SMA
Alamat : Kantor Kepala Desa Sungai Rotan

3. Nama : Marsum Batubara
umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Percut
Pendidikan : SD
Alamat : Desa Percut

4. Nama : Syafei Lubis
umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Kandep Kecamatan Percut Sungai Tuan
Pendidikan : SGA
Alamat : Kandep Percut Sungai Tuan.

5. Nama : Dahlan Sulaeman
umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Tungkusan
Pendidikan : SD
Alamat : Desa Tungkusan Kecamatan Tanjung Muda Hilir

6. Nama : Yahya Damanik
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Tambun Nabolon
Pendidikan : SMP (ABRI) Purnawirawan
Alamat : Desa Tambun Nabolon (Simalungun)

7. Nama : Drs. J.L. Sinaga
 Umur : 47 Tahun
 Pekerjaan : Ka Kandep P dan K Kabupetn Simalungun
 Pendidikan : Sarjana
 Alamat : Jalan Merdeka Pematang Siantar.
8. Nama : Drs. Iden Purba
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Ka Bangdes Kabupaten Simalungun
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi
 Alamat : Kantor Bupati Jl. Asahan P. Siantar.
9. Nama : Safar Suharto
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Desa Kandangan
 Pendidikan : SMP (ABRI) Purnawirawan
 Alamat : Desa Kandangan Kecamatan Bandar
10. Nama : Drs. Darwin Damanik
 Umur : 45 Tahun
 Pekerjaan : Anggota DPRD Tingkat II Simalungun
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi
 Alamat : Universitas Simalungun P. Siantar.
11. Nama : J. Gultom
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Ka Kandep P dan K Kab. Tapanuli Utara.
 Pendidikan : B I Sejarah
 Alamat : Kandep P dan K Kab. Tapanuli Utara
12. Nama : Tapotan Penjaitan
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Kepala SPG Perguruan HKI Tarutung
 Pendidikan : Sarjana Muda Pendidikan
 Alamat : SPG Tarutung.
13. Nama : M. Manurung
 Umur : 52 tahun

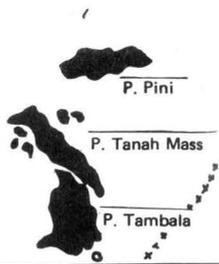
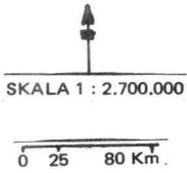
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
Alamat : Balige.

14. Nama : S.H. Hutagaol
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Guru SMA
Pendidikan : Sarjana Muda Pendidikan
Alamat : SMA Balige.

15. Nama : J. Simanjuntak
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Pendidikan Masyarakat Kecamatan Balige
Pendidikan : SGA
Alamat : Pendidikan Masyarakat Kecamatan Balige.

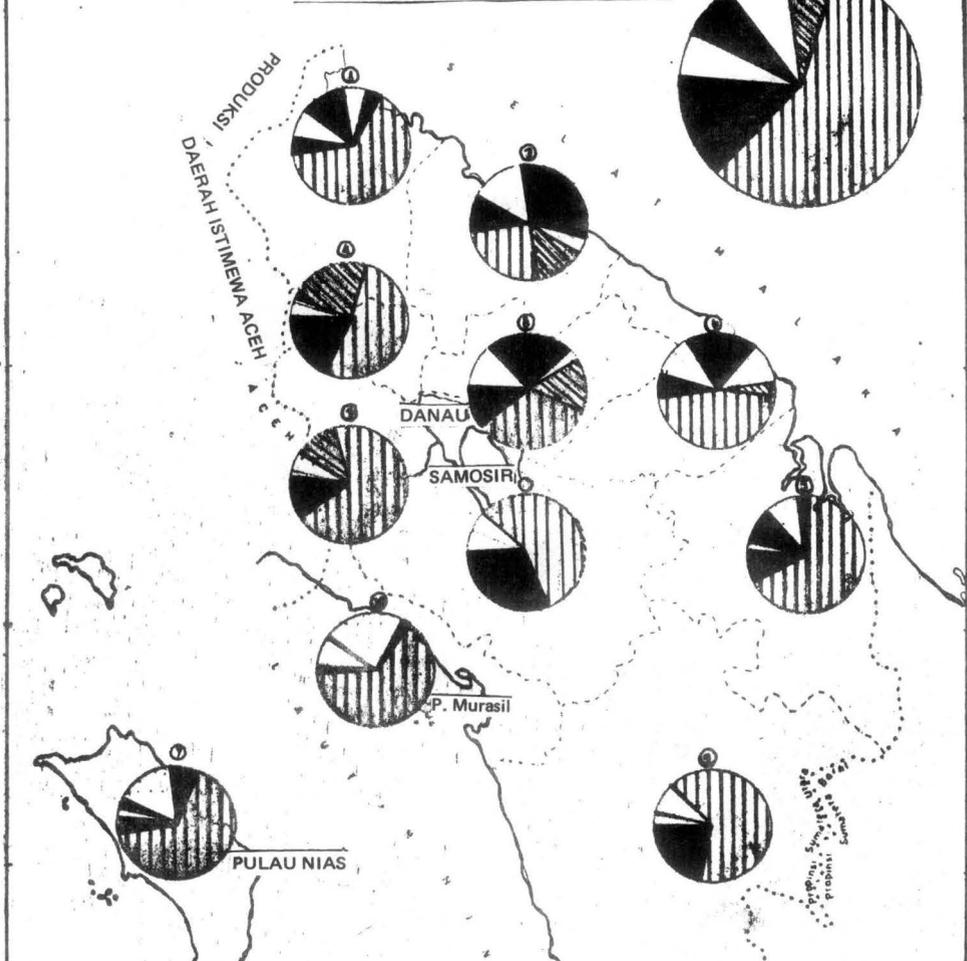
**

PUSAT-PUSAT PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH TK. I SUMATERA UTARA



- Keterangan**
- Wilayah Pembangunan
 - Wilayah I Pusat Medan
 - Wilayah II Pusat Pematang Siantar
 - Wilayah III Pusat Tanjung Balai
 - Wilayah III Pusat Sibolga
 - Wilayah V Pusat Padang Sidempuan
 - Ibu Kota Propinsi
 - Pusat Wilayah
 - Kota Kabupaten
 - Batas Propinsi
 - Batas Kabupaten

PENGUNAAN TANAH PROPINSI SUMATERA UTARA



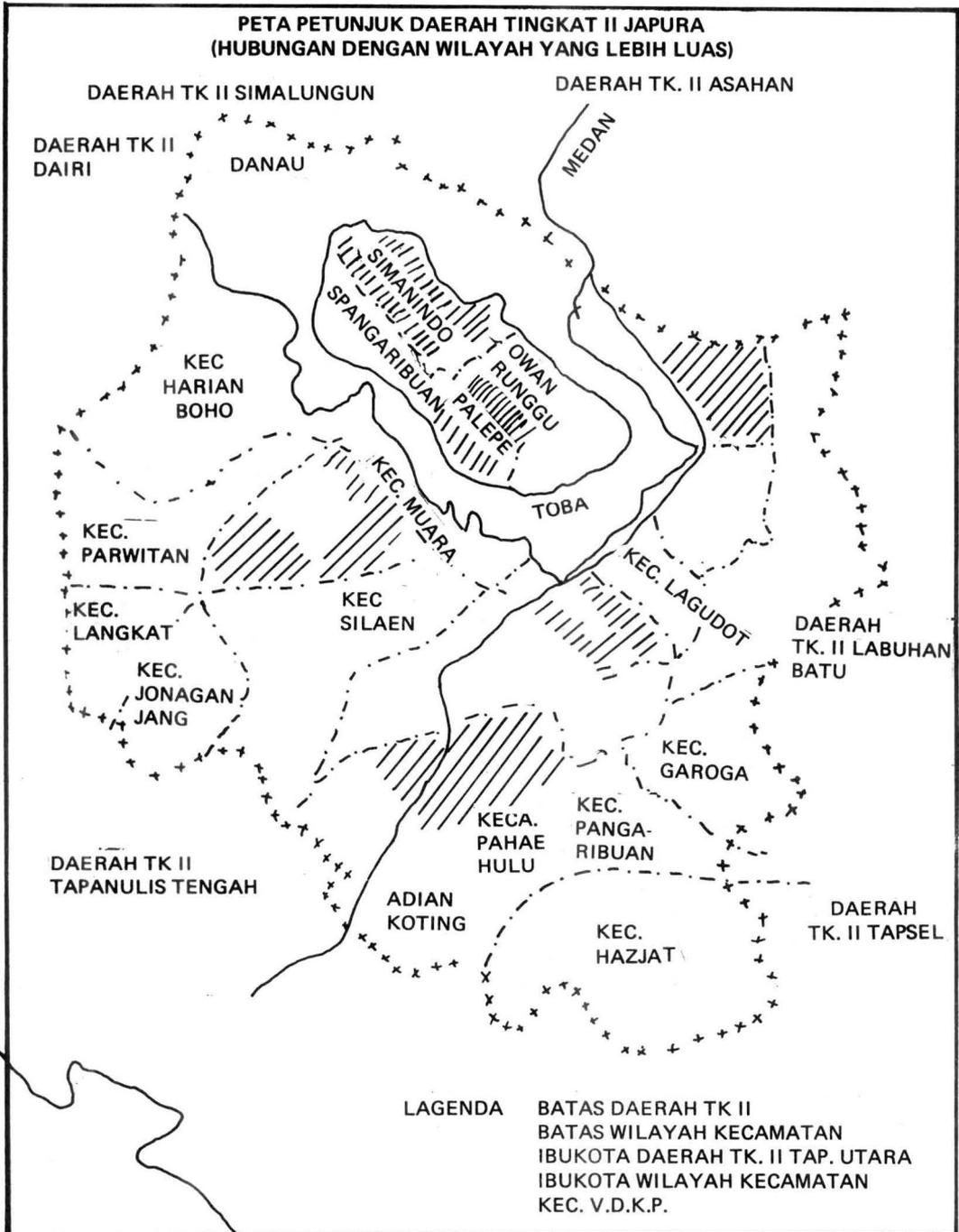
LEGENDA

- Perkampung, Empartemen, Kota
- Persawahan
- Perkebunan Besar
- Perkebunan Rakyat
- Pertanian tanah kering
- Hutan
- Alang-alang - Tanah tandus (rusak)
- Danau/Tanah rawa

P. PINI

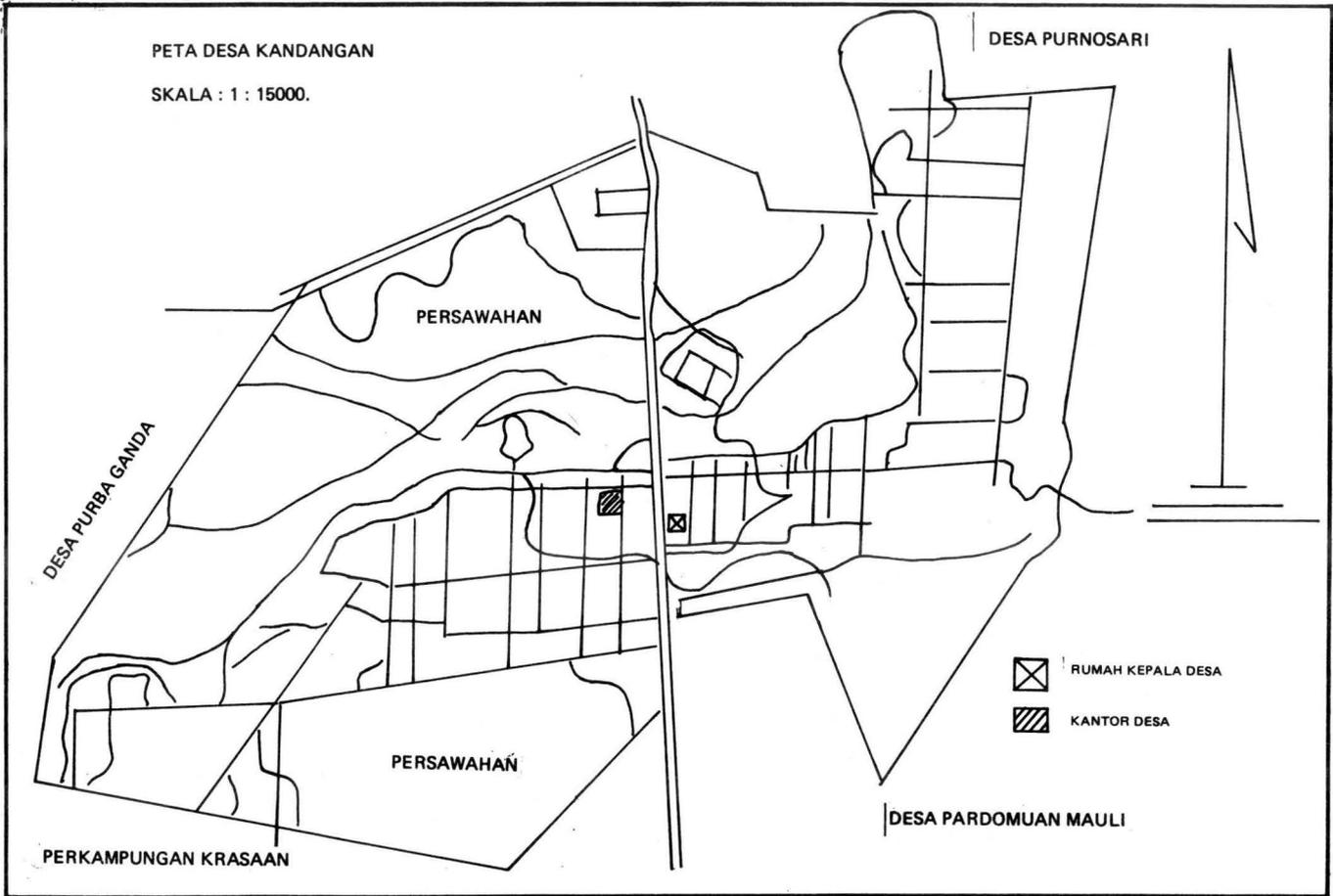
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Asahan 2. Kabupaten Dairi 3. Kabupaten Deli Serdang 4. Kabupaten Karo 5. Kabupaten Labuhan Batu 6. Kabupaten Langkat | <ul style="list-style-type: none"> 7. Kabupaten Nias 8. Kabupaten Samalungun 9. Kabupaten Tapanuli Selatan 10. Kabupaten Tapanuli Tengah 11. Kabupaten Tapanuli Utara 12. Propinsi Sumatera Utara |
|--|---|

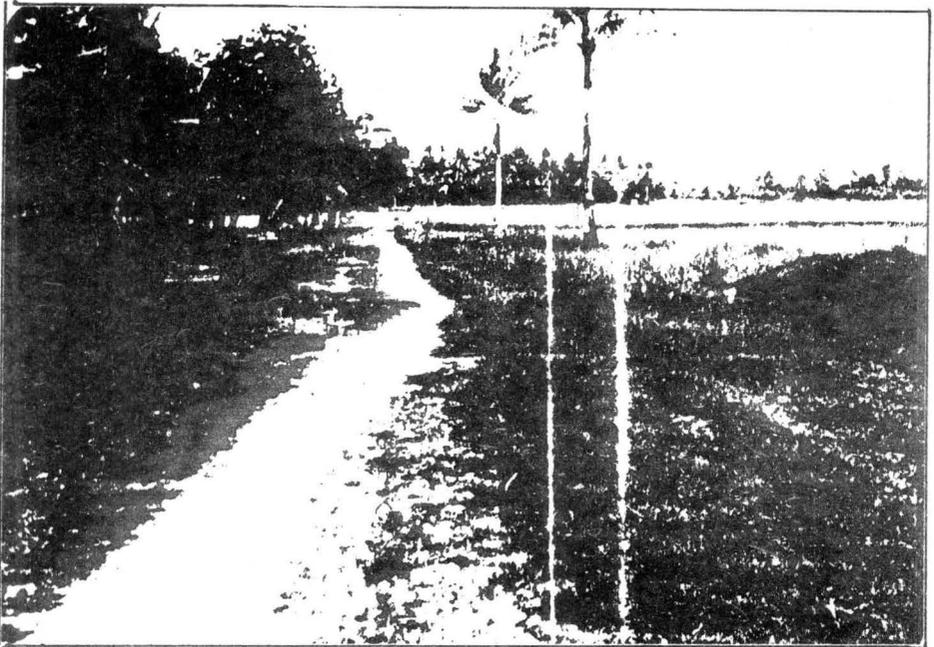
**PETA PETUNJUK DAERAH TINGKAT II JAPURA
(HUBUNGAN DENGAN WILAYAH YANG LEBIH LUAS)**



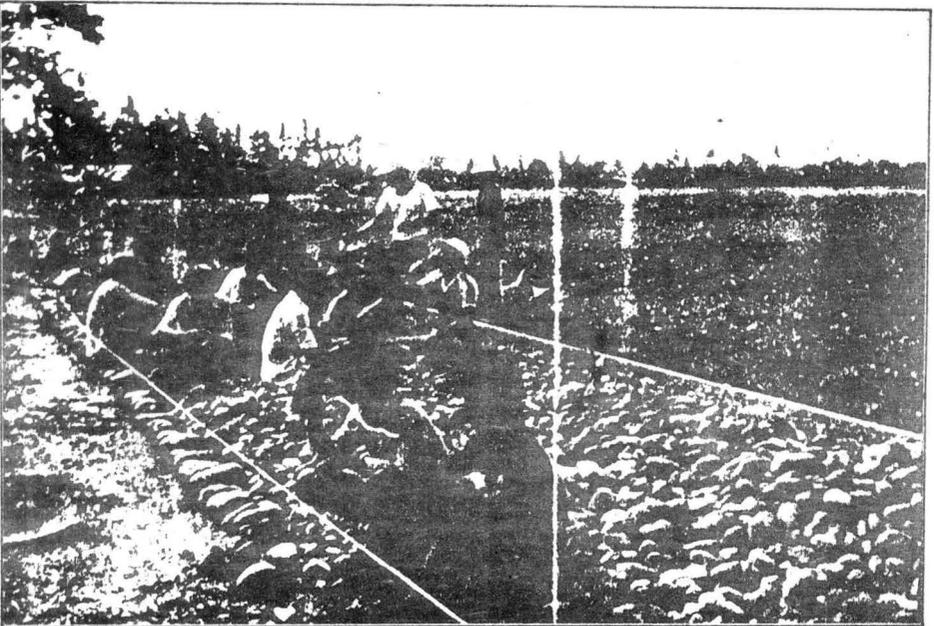
PETA DESA KANDANGAN

SKALA : 1 : 15000.

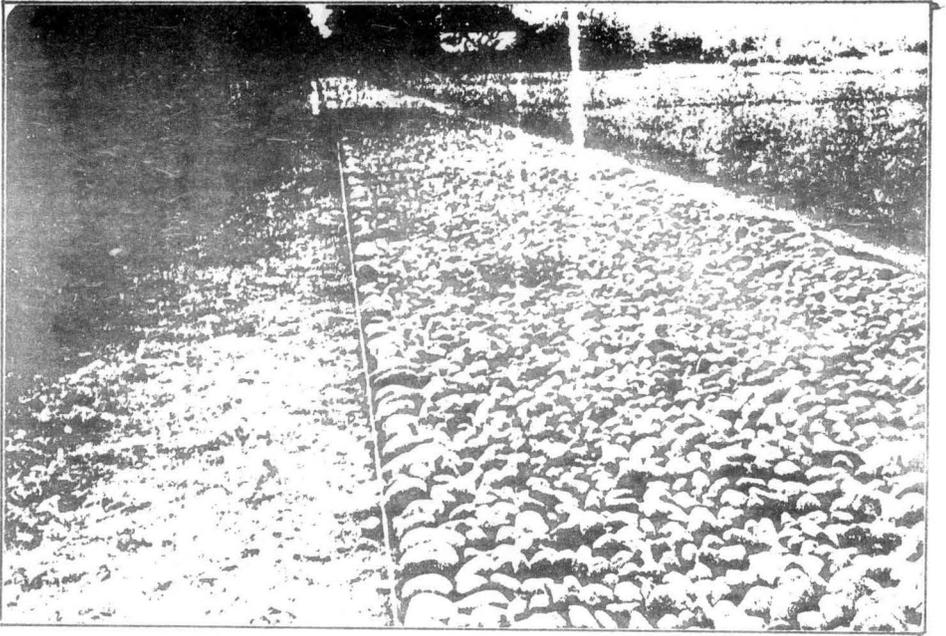




PROYEK BANGDES JALAN LORONG IX-X SEBELUM DIKERJAKAN



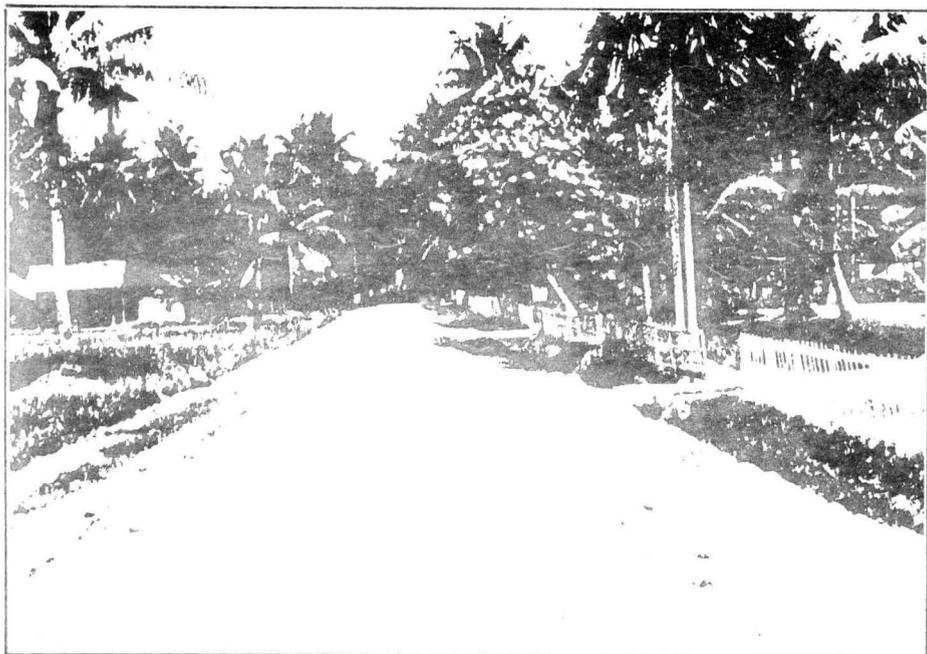
PROSES PEMASANGAN BATU (RAKYAT SEDANG BERISTIRAHAT DALAM KERJA GOTONG ROYONG)



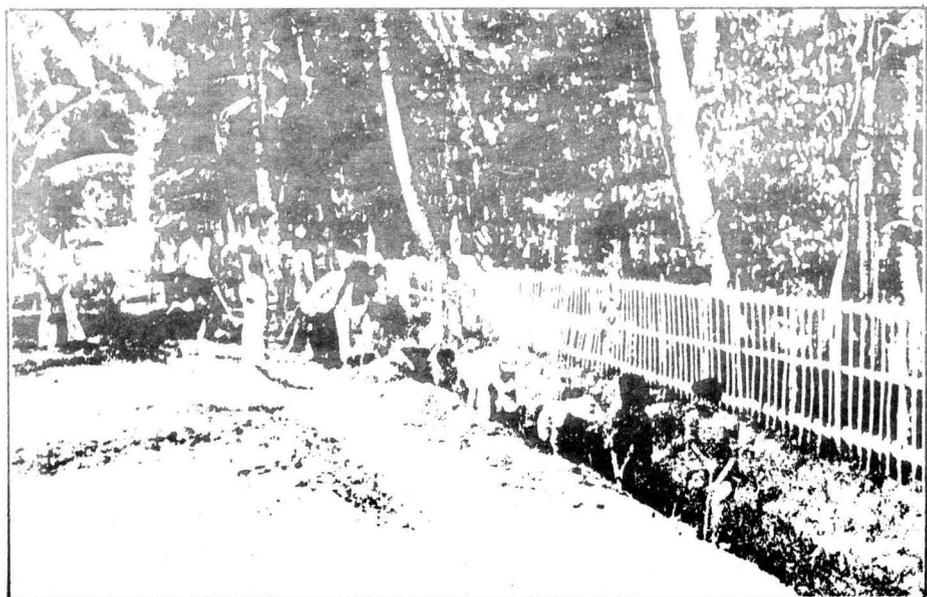
SIAP PASANG BATU



BALAI DESA & KANTOR KEPALA DESA SEI.ROTAN



JALAN LORONG IX-X YANG TELAH DIKERASKAN DENGAN UANG BANTUAN PEMERINTAH/BANGDES THN 1980/1981.



PEMANDANGAN GOTONG ROYONG/SWADAYA MASYARAKAT DI PINGERASAN JALAN LORONG IX-X.

PROPINSI SUMATERA UTARA



Tidak diperdagangkan untuk umum

